

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK



LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PERAK
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Perak Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Perak Tahun 2023 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Jombang

Perak, Desember 2023
CAMAT PERAK

Drs. SUPRIYONO
Pembina
NIP.197010131992011001

BAB I PENDAHULUAN

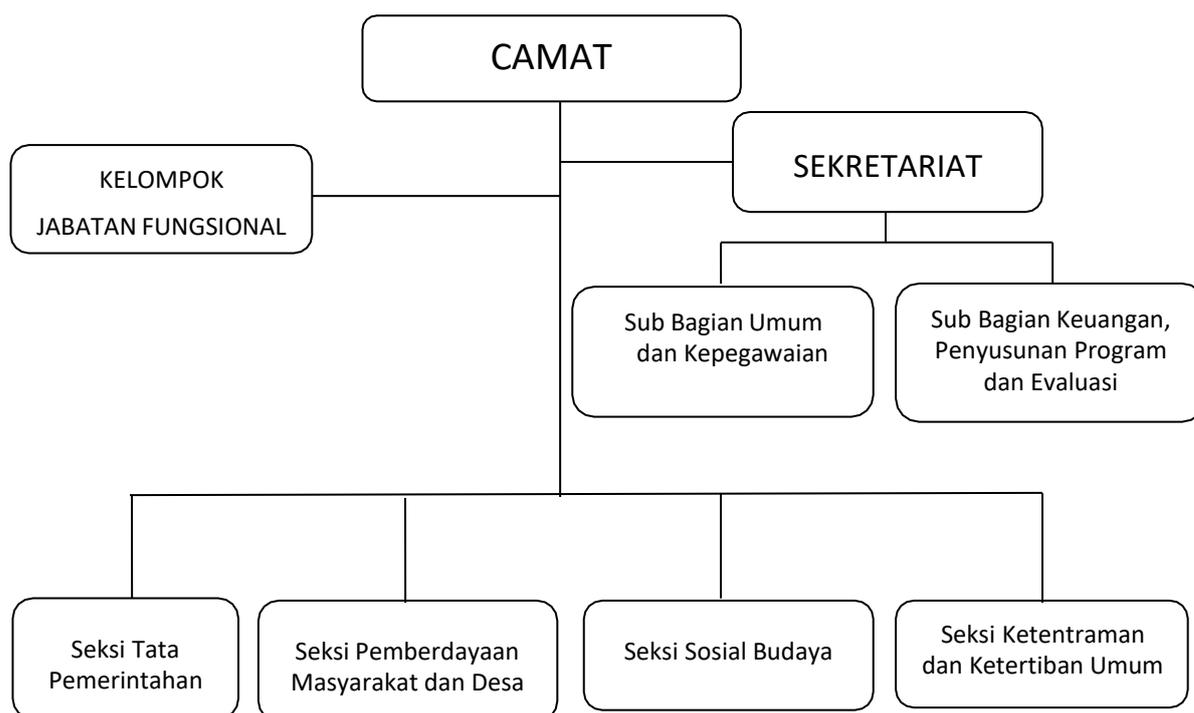
Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Perak



Rincian personil pegawai Kantor Kecamatan Perak, mulai dari jabatan eselon III dan IV, serta staf pada Kantor Kecamatan Perak Kabupaten Jombang per bulan Januari 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Pegawai Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kecamatan Perak

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Drs. SUPRIYONO	197010131992011011	Camat
2	ABDUL WAKHID, SE	196812011994031006	Sekretaris Kecamatan
3	SANTOSA, S.Sos	196605041996021001	Kasi Tata Pemerintahan
4.	SUHEDI,S.IP	19670128 198912 1001	Kasi Pemerdayaan Masyarakat Desa
5.	DINI NURFIBRIANY, S.E., MM	198302272011012002	Kasi Sosial budaya

6.	IDA AYU NURSANTI,SE	19801204 200604 2 025	Kasubag Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset
7.	BAGUS RACHMAT, S.IP	198509282005011001	Kasubag Keuangan Penyusunan Program,dan Evaluasi

Tabel 2.2
Pegawai Jabatan Staf/Pelaksana

No	Nama	NIP	Jabatan
1	AHMAD SHOLI	19680812 200604 1 007	Staf Kasi Tata Pemerintahan
2	YUNI SUSILAWATI	19790626 201001 2 001	Staf Kasi Tata Pemerintahan
3	TITIK ZAKIYAH, SE	19680110 201001 2 001	Staf Kasi Tata Pemerintahan
5	CHOLILUL UZAIR	19741024201001 1 004	Staf Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi
6	DANY EKA NOVITASARI, A.Md.Keb	198401032017042003	Staf Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi
7	IRFAN YUDIANTO	19691124 200906 1 002	Staf Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum
8	SLAMET	19670323 200801 1 009	Staf Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum
9	SETYA BUDI	19660910 199003 1 009	Staf Pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum
10	AMBAR SULISTYOWATI	19780601 200901 2 002	Staf Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian
11	NURCHOLIS	19670607 20070 1 1 026	Staf Pelaksana Subag Umum dan Kepegawaian
12	SAIFUDIN ZUHRI	19730308 200906 1 001	Staf Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, bahwa kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;

- i. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- j. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- k. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- l. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga;
5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
7. Pengelolaan kearsipan;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
9. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
3. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusanlain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
5. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
6. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
7. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
8. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
9. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan dan Kecamatan;
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
3. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
6. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang sosial budaya;
3. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi dibidang sosial budaya;
4. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;

5. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
6. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
2. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka Agama diwilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan dengan Bupati;
9. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1.3 ISU STRATEGIS

1 Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Perak dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, adalah:

- a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Perak sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Perak.
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
- c. Belum terakomodirnya seluruh usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
- d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Perak kurang cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Perak terkendala dengan cepatnya usia fisik, dikarenakan sebagian besar jalan di wilayah Kecamatan Perak merupakan jalan utama antar Kabupaten dengan lalu lintas cukup padat menyebabkan jalan sering dilalui kendaraan – kendaraan besar dengan muatan banyak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Perak pada tahun 2023 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2023 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam

proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan Kegiatan yang terjadi pada Tahun Berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
 - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2023
 - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
 - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Perak belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2023 yakni peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan Kabupaten Jombang sehingga semua langkah- langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Perak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Visi Kabupaten Jombang:

Visi dan misi merupakan gambaran otentik Kabupaten Jombang dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023. Gambaran Nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Jombang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat,

maka visi Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2018-2023 yang hendak dicapai adalah: “Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”.

Misi Kabupaten Jombang:

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dijabarkan dalam 3 (tiga) Misi dan Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Perak, maka Misi yang diemban dan harus diwujudkan adalah Misi ke 1 yakni:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional, dengan penjelasan: Misi ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang yang telah dibahas diatas tidak terlepas dari Program Nasional seperti SPM maupun Program Internasional yaitu SDGs dan akan dibahas selanjutnya. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Program Nasional Program Nasional yang mempengaruhi dalam pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang adalah Program SPM yang telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa

masukannya, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibagi dalam bidang urusan, yaitu :

1. Perumahan Rakyat
2. Pemerintahan Dalam Negeri
3. Sosial
4. Kesehatan
5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Lingkungan Hidup
7. Keluarga Berencana dan Sejahtera
8. Pendidikan
9. Pekerjaan Umum
10. Ketahanan Pangan
11. Kesenian
12. Komunikasi dan Informasi

Telaahan visi dan misi Kabupaten Jombang dalam hal ini Kecamatan Perak, Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan. Bersih dan Profesional, mendukung SPM di bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Jombang tidak terlepas dari Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD sesuai dengan bidang urusannya. Oleh karena itu dengan melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu pada cakupan dan kualitas pelayanan dasar maka visi dan misi Kabupaten akan tercapai.

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Program Internasional SDGs (Sustainable Development Goals) adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia.

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dibangun MDGs (Millenium Development Goals). Ini merupakan hasil pertemuan pada 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa), New York, Amerika Serikat yaitu Sustainable Development Summit, yang di dalamnya merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Adapun tujuan SDGs adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

Target utama SDGs adalah mengentaskan kemiskinan. Tapi, Indonesia akan menggunakan tiga indikator terkait dengan dokumen SDGs, yaitu pembangunan manusia atau human development yang meliputi pendidikan dan kesehatan, lingkungan atau social economic development dan lingkungan yang besar atau environmental development berupa ketersediaan kualitas lingkungan dan sumber daya alam yang baik. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini :

1. Tanpa Kemiskinan, Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan, Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.

4. Pendidikan Berkualitas Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesetaraan Gender Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
8. Mengurangi Kesenjangan Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
9. Keberlanjutan Kota dan Komunitas Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
10. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
11. Aksi Terhadap Iklim Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
12. Kehidupan Bawah Laut, Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
13. Kehidupan di Darat Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemaknaan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
14. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

15. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Telahaan visi dan misi Kabupaten Jombang yang terkait dengan OPD Kecamatan Perak memberikan gambaran peran serta keterlibatan secara langsung terhadap tujuan global SDGs yaitu

sebagai berikut: Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional mendukung tujuan global SDGs yang ke-16 yakni: Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

Program/Kegiatan yang dilaksanakan di setiap OPD di Kabupaten Jombang dalam hal ini Kecamatan Perak mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang berkesinambungan dengan program SDGs.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Tantangan :

- a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
- b. Jaringan Internet yang masih terkadang crowded berpengaruh pada terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat;
- c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
- e. Perubahan KTP SIAK menjadi e- KTP di Kecamatan Perak saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP terkadang tidak dapat dioperasikan yakni alat perekaman sidik jari dan iris mata terkadang trouble sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Jombang;

- f. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Perak cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP (Barcode) dan perangkat scanner hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada;
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang pemeliharaan secara berkala;
- c. Mengikutsertakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
- d. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
- e. Untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja pegawai diperlukan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan, sebagai upaya merespon tuntutan eksternal untuk selalu memperbaiki kinerja serta optimalisasi dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern dan pengawasan melekat.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Perak terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Perencanaan Pembangunan
 - Dalam Perencanaan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan melalui kegiatan Musrenbangcam, tetapi masih terdapat beberapa usulan yang belum terealisasi, dikarenakan terbatasnya anggaran pada APBD Kab. Jombang.
 - Diperlukan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan melibatkan stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan

dalam penyusunan rencana strategis tahun 2018- 2023 sehingga diperlukan output yang lebih aspiratif.

- Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir sebagai modal database dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

b. Keamanan dan Ketertiban

Pada Tahun Anggaran 2023, OPD Kecamatan Perak dalam bidang keamanan dan ketertiban melakukan penertiban, pembinaan, pemantauan sehingga wilayah Kecamatan Perak dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif dan untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung.

c. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pada Tahun Anggaran 2023, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Perak melalui 1 (satu) Program rutin dan 5 program Kecamatan dengan 11 kegiatan dan 20 sub kegiatan.

d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Diperlukan pembinaan lebih intensif dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa agar potensi yang ada dapat lebih berkembang serta dapat bersaing di era globalisasi diantaranya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), perdagangan transnasional, serta perkembangan teknologi informasi.

1.4 CASCADING

Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Perak Kabupaten Jombang terkait dengan pencapaian misi pertama yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional, akuntabel, inovatif, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik yang berkualitas.

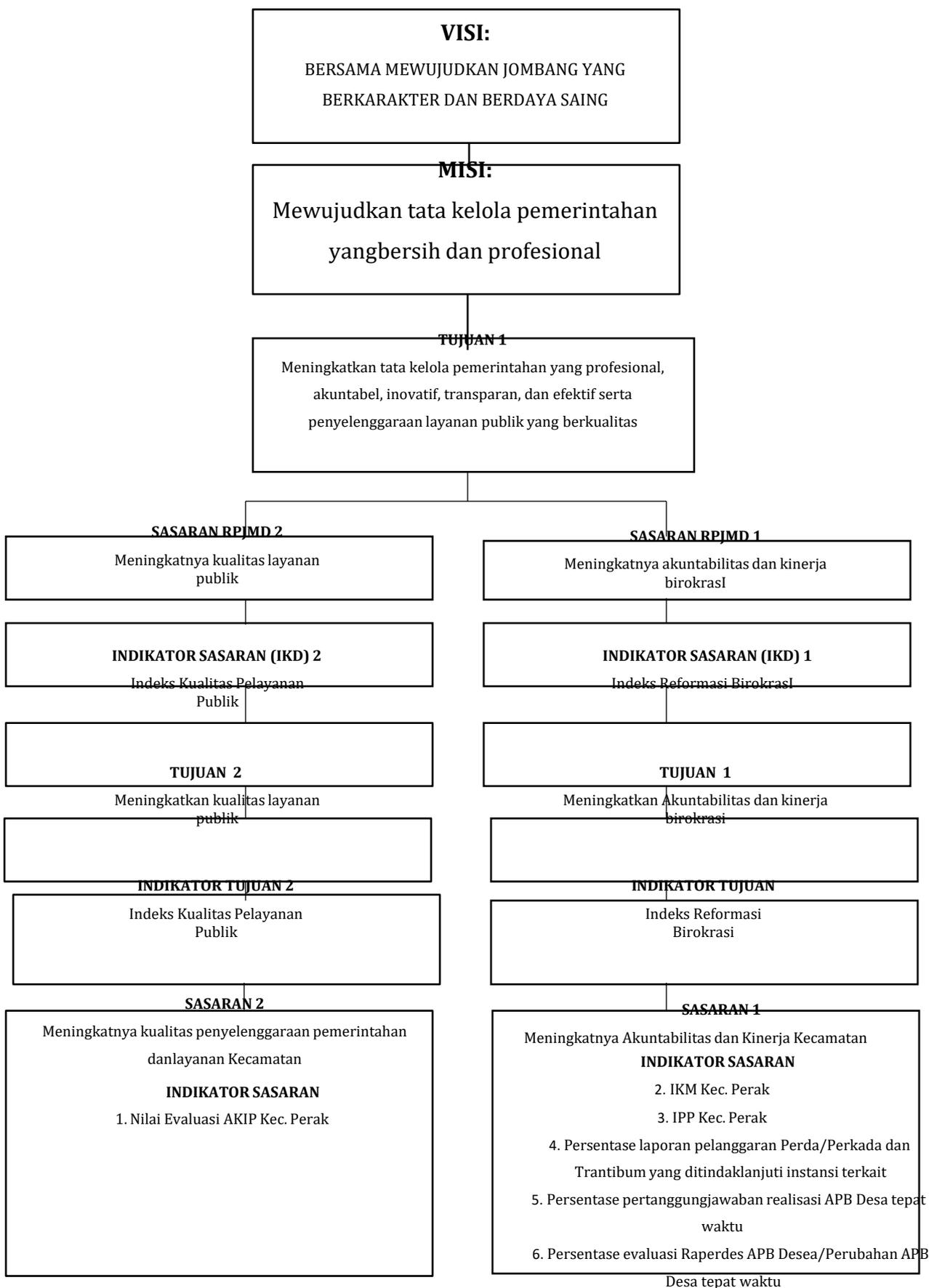
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengantujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Tujuan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

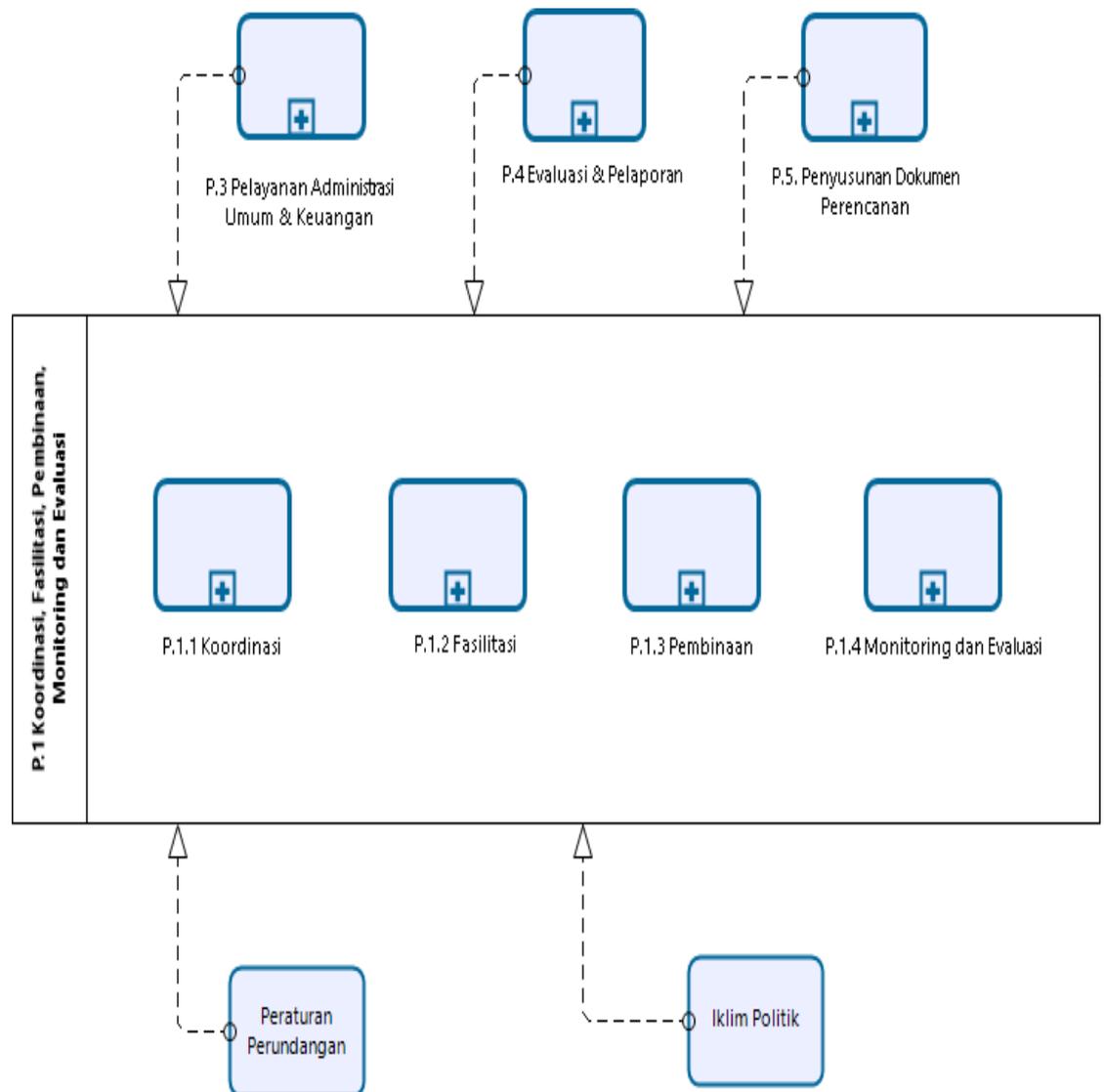
1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan.

Adapun keterkaitan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang dengan Perubahan Renstra Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sebagai berikut :



1.5 PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana berikut:



P.1 Koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam gambar di atas dapat dijelaskan bahwa core utama dalam poin P.1 terdapat Core dibawahnya yaitu Core Koordinasi yang mencakup proses bisnis tentang koordinasi antar kabupaten dengan kecamatan dan turun ke desa, Core Fasilitasi mencakup kegiatan fasilitasi program/kegiatan kabupaten kepada desa/masyarakat, core Pembinaan mencakup kegiatan pembinaan kapasitas aparatur desa, core monitoring dan evaluasi mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pemerintah kabupaten yang di amanatkan ke pemerintah desa. Dari keseluruhan Core tersebut terdapat variabel yang dapat mempengaruhi proses bisnis tersebut di antaranya variabel peraturan Perundang-undangan dan Iklim Politik.

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Jombang Nomor: X.700/541/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2022 perihal laporan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP, nilai akuntabilitas kinerja Kecamatan Perak Tahun 2023 adalah 72,61 termasuk kategori BB dengan predikat “Sangat Baik” dengan catatan hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Dokumen Renstra telah di reviu secara berkala namun belum terdapat inovasi.
2. Pengukuran Capaian Kinerja belum melampirkan data dukung yang lengkap
3. Laporan Kinerja pada capaian IPP belum menyajikan informasi tentang ketidak tercapainya target yang telah ditetapkan.
4. Dalam LkjIP telah menyajikan hambatan namun dalam upaya perbaikan belum menyajikan langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan IPP.
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dan telah terdapat SK Evaluator yaitu sebanyak 8 orang namun hanya 1 orang yang telah bersertifikasi.
6. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam BA Evaluasi belum melaksanakan secara memadai (tidak melihat pemenuhan keberadaan

maupun kualitas dokumen.

Dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja, dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja agar melampirkan bukti adanya inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik.
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja agar melampirkan data dukung yang lengkap dalam mengukur capaian kinerja.
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja agar :
 - a. Menyajikan informasi tentang ketidak tercapainya target yang ditetapkan dalam Laporan Kinerja mengenai capaian kinerja atas capaian IPP.
 - b. Dalam dokumen LKJIP menyajikan langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan IPP dalam rangka upaya untuk perbaikan.
4. Evaluasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi agar :
 - a. Menyajikan SK Tim Evaluator dan kedepan diharapkan seluruh tim telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam Berita Acara evaluasi dilaksanakan secara memadai yaitu dengan melihat pemenuhan dokumen, keberadaan maupun kualitas dokumen.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program dan kegiatannya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1.1 RENCANA STRATEGIS

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Perak pada periode Tahun 2018-2023.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan

pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Perak mendukung Misi ke 1 (satu) Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018 – 2023 adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Perak tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan yang akan diwujudkan dalam mencapai misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

dengan sasaran:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan.

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan:

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan:

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Sub kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub kegiatan:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

2.1.2 RENCANA KERJA TAHUN 2023

Rencana kinerja tahun 2023 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2023. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2023. Rencana kinerja Kecamatan Perak Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kinerja Tahun 2023.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Perak atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak Tahun 2023 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Perak Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023,

dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Perak untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan :

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Perak
Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	1. Nilai SAKIP	72
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	2. IKM Kecamatan Perak	89,95
		3. IPP Kecamatan Perak	3,10
		4. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%
		5. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%
		6. Persentase evaluasi RaperdesAPBDesa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	52.08 %	70.83 %	85.42 %	100%	3,025,962,202
2.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	85,3	26.05 %	51.70 %	75.85 %	100%	6,526,250
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	25%	50%	75%	100%	19,155,000
4.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait	100%	24%	48%	73.7%	100%	9,314,000

5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa	100%	12,50 %	50,00 %	62,50 %	100 %	13,066,600
			Persentase rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	25,00 %	50,00 %	75,00 %	100 %	
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APBDesa/Perubahan APBDesa yang di evaluasi	100%	62,50 %	75,00 %	87,50 %	100 %	44,928,500
			Jumlah Lembaga/ Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang aktif	26 lembaga	22,50 %	50,00 %	72,50 %	100 %	
Jumlah									3,118,952,552

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Capaian kinerja merupakan peningkatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak terarah sesuai pilihan prioritas.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Perak dengan pemerintah, ditetapkan sebagaimana table berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/RUMUS PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Perak tahun n	Hasil Evaluasi AKIP Kec. Perak	Camat Perak
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak tahun n	Hasil Survey IKM Kec. Perak	Camat Perak
		IPP Kecamatan Perak	IPP Kecamatan Perak tahun n	Hasil Survey IPP Kecamatan Perak	Camat Perak
		Persentase laporan pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait}}{\text{Jumlah laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait}} \times 100\%$	Laporan Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	Camat Perak
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi LRA Desa	Camat Perak
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa dan Perubahan APBDesa tepat waktu}}{\text{Jumlah laporan Raperdes APBDesa dan Perubahan APBDesa}} \times 100\%$	Laporan evaluasi Raperdes APBDesa	Camat Perak	

Sebagai upaya merealisasikan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah dirumuskan Sasaran Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Perak, yaitu:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Target dan Pengukuran Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	FORMULASI
1.	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh PNS Kec Perak -----x100% Jumlah PNS Kec Perak
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yng tersusun tahun n
-------	---	--	---	-----------	--

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100% Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan -----x100% Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi	20 orang/bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi tahun n
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tahun n
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n

1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100% Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
1.3.1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
1.3.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
1.3.3	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 Paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
1.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n
1.3.5	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
1.3.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100% Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan

1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	5 unit	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100% Jumlah perencanaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 Laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	-	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik -----x100% Jumlah Barang milik daerah
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara tahun n
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya	26 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n

1.6.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	16 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara tahun n
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85	Nilai PATEN Kecamatan Perak tahun n
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk yang di verifikasi -----x100% Jumlah pengajuan pelayanan Adminduk
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan perizinan
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum
3.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 Laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n

3.1.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 Kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan Tahun n
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Jumlah Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu -----x100% Jumlah Desa
4.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	13 Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap tahun n
4.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa tahun n
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif -----x100% Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 Lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n
5.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Perak sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari

0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Perak memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan tahun 2021.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Perak diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2021, Kecamatan Perak memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Perak tahun 2021 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembandingan, meliputi:

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Perak Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tujuan Kecamatan :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas layanan publik

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	72	72,61	100,8%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Perak	89,95	94,39	104,9%
	IPP Kecamatan Perak	3,10	2,45	79%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian IKU				97,45%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian IKU KecamatanPerak pada tahun 2023 telah tercapai 97,45% (predikat sangat memuaskan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 72 telah tercapai 72,61 dengan tingkat capaian 100,8% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/541/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

Berikut kami sajikan data pendukung keberhasilan pencapaian nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak :

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI	KETERANGAN
1.	Perencanaan Kinerja	30%	25,53	Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 25,53 dari bobot 30% atau dengan capaian 85,09% (BB) yang berarti bahwa seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu dokumen Renstra telah direviu secara berkala namun belum terdapat inovasi.

2.	Pengukuran Kinerja	30%	23,58	<p>Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,58 dari bobot 30% atau dengan capaian 78,61% (BB) yang berarti bahwa sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%), masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja namun pengukuran capaian kinerja belum melampirkan data dukung yang lengkap.</p>
3.	Pelaporan Kinerja	15%	6,91	<p>Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 6,91 dari bobot 15% atau dengan capaian 46,07% (C) yang berarti bahwa sebagian kecil kriteria telah terpenuhi. Masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja dan komitmen dalam manajemen kinerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja namun pada capaian IPP belum menyajikan informasi tentang ketidak tercapainya target yang ditetapkan. b. Dalam LkjIP telah menyajikan hambatan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja, namun dalam upaya perbaikan belum menyajikan langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan IPP.

4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	16,59	<p>Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 16,59 dari bobot 25% atau dengan capaian 66,38% (CC) yang berarti bahwa sebagian besar kriteria telah terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan, namun masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dan telah terdapat SK Evaluator yaitu sebanyak 8 orang namun hanya 1 yang bersertifikasi. b. Hasil akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam BA evaluasi belum dilaksanakan secara memadai.
Jumlah		100%	72,61	

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja diatas dapat diketahui sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator kinerja :

1. IKM Kecamatan Perak

IKM Kecamatan Perak ditargetkan 89,95 telah tercapai 94,39 dengan tingkat capaian 104,9% berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/350/415/10.1.3/2023. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2023 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik..

Berikut kami sajikan data pendukung IKM Kecamatan Perak per jenis layanan :

NO	JENIS LAYANAN	IKM 2023
1.	KTP	94.89
2.	KK	95.9
3.	SKCK	95.5
4.	Mutasi / Pindah Kependudukan	92.56
5.	Surat Keterangan Lainnya	93.1
IKM Unit Layanan		94.39

2. IPP Kecamatan Perak

IPP Kecamatan Perak ditargetkan 3,10 telah tercapai 2,45 dengan tingkat capaian 79% berdasarkan SK Bupati Nomor 188.4.45/406/415/10.1.3/2023.

Berikut kami sajikan data pendukung IPP Kecamatan Perak :

NO	ASPEK DAN INDIKATOR	BOBOT	JUMLAH NILAI INDIKATOR	NILAI ASPEK
1.	Aspek Kebijakan Pelayanan	30%	1,82	0,44
2.	Aspek Profesionalisme SDM	18%	1,3	0,33
3.	Aspek Sarana dan Prasarana	15%	3,31	0,6
4.	Aspek SIM Pelayanan Publik	15%	0,9	0,1
5.	Konsultasi dan Pengaduan	15%	1,85	0,19
6.	Inovasi	7%	0	0
Indeks Pelayanan Publik		100%	9,18	2,45

2. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.

Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait target tahun 2023 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berat kerjasama yang baik antar stakeholder sehingga semua laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum dapat ditindaklanjuti instansi terkait.

3. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu target tahun 2023 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berat kerjasama yang baik dengan desa sehingga semua laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes dapat dilaporkan tepat waktu.

4. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu target tahun 2023 adalah 100% dapat terealisasi 100% (tercapai 100%) berat kerjasama yang baik dengan desa sehingga semua Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa dapat dievaluasi tepat waktu.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Perak Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	97,45%

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Perak Tahun 2023 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Kinerja Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Telaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	5 laporan	100%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec.	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	100%

			Perak yang di fasilitasi			
1.2.2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%
1.2.3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%
1.3.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket	24 Paket	100%
1.3.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	1 Paket	1 Paket	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
1.3.3	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 dokumen	1 dokumen	100%
1.3.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
1.4.1	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor /	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	10 unit	10 unit	100%

	bangunan lainnya	lainnya				
1.4.2	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	0	0	0
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
1.5.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 laporan	24 laporan	100%
1.5.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum	0	0	0
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
1.6.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	100%
1.6.2	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	8 unit	8 unit	100%

1.6.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Tersedianya Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Perak yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,3	85	99,6%
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
2.1.1	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	12 laporan	100%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
3.1	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100%
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%

3.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%
4.1	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100%
4.1.1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara	12 laporan	12 laporan	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%

5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	13 Desa	13 Desa	100%
5.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa	26 dokumen	26 dokumen	100%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
6.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100%
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	13 Desa	100%
6.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	78 lembaga	100%

3.1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Tabel 3.4

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan 2 Tahun Terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		% Capaian	Tahun 2022		% Capaian	Tahun 2023		% Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	Nilai	70,01	70,03	100,02%	71	70,93	99,9	72	72,61	100,8%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	Nilai	85,52	91,27	106,72 %	86	89,85	104,5	89,95	94,39	104,9%
	IPP Kecamatan Perak	Nilai	3,00	2,63	87,66 %	3,10	2,31	74,5	3,10	2,45	79%

Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	Persen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	Persen	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	Nilai	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	84	64.04	76,23%	76,5	80,25	105,6%	85,3	85	99,6%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak dari tahun 2021, 2022 dan 2023 selalu mengalami peningkatan disebabkan karena penerapan standart SAKIP pada pelaksanaan tupoksi oleh masing – masing stakeholder sudah berjalan dengan baik.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021-2023 sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan Perak dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2021 – 2022 mengalami penurunan sebesar 1,42 dan 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,54.
2. IPP Kecamatan Perak dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan sebesar 0,32 dan pada tahun 2022 – 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,14
3. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait sebesar 100 %.
4. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu sebesar 100 %.
5. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu sebesar 100 %.

3.1.3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	71,5	72,61	101,55%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	86	94,39	109,8%

	IPP Kecamatan Perak	3,73	2,45	65,7%
	Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA - RATA TINGKAT KEMAJUAN				96,18%

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,3	85	99,6%
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%

Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak adalah 72,61 dari target akhir

Perubahan Renstra sebesar 71,5 Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 101,55% dari target akhir RPJMD/Renstra.

Sasaran II : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran :

1. IKM Kecamatan Perak, realisasi 94,39 dari target Perubahan Renstra sebesar 86 Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 109,8% dari target akhir RPJMD/Renstra.
2. IPP Kecamatan Perak realisasi 2,45 dari target Perubahan Renstra sebesar 3,73. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 65,7% dari target akhir RPJMD/Renstra.
3. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra
4. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui Perbandingan Target akhir Renstra dengan Realisasi pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pada Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/ kota Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
2. Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Nilai PATEN Kecamatan Perak realisasi 85 dari target Perubahan Renstra sebesar 85,3. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 99,6% dari target akhir RPJMD/Renstra.
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan dan

Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu, realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.
6. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif realisasi 100% dari target Perubahan Renstra sebesar 100%. Dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Perak telah mencapai 100% dari target akhir RPJMD/Renstra.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga periode Perubahan Renstra 2018-2023 dimana ada perubahan sasaran strategis kecamatan dan indikator sasarannya. Pada tahun 2023 target sasaran strategis renstra dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 96,18%.

3.1.4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Realisasi Level Nasional/Internasional

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi Level Nasional/Internasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi tahun 2023	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional	Ket.
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIPKec. Perak	72,61 (BB)	72,70 (BB)	83,86 (BB)	63,26	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	94,39	88,38	86,25	Tidak ada realisasi nasional	-
		IPP Kecamatan Perak	2,45	3,39	4,36	Tidak ada realisasi nasional	-
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkadaa dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	Tidak ada realisasi nasional	
		Persentase Laporan pertanggungjaban Realisasi APBDesatepat waktu	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	Tidak ada realisasi nasional	
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesatepat waktu	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	Tidak ada realisasi nasional	

NO	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Realisasi tahun 2023	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
1	Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	-	-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,3	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-

4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Tidak ada realisasi Kabupaten	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa :

a. Realisasi Nilai Evaluasi AKIP telah tercapai 72,61 melebihi realisasi rata rata nasional yaitu nilai akuntabilitas kinerja nasional 63,26 dengan selisih 9,35.

b. Standar Nasional :

1. IKM Kecamatan Perak
2. IPP Kecamatan Perak
3. Persentase laporan pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait
4. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu
5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu

Standar nasional untuk indikator strategis diatas tidak ada.

3.1.5. Analisis Atas Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 target sasaran strategis Kecamatan Perak dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 96,18% dengan kata lain kinerja kecamatan belum mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

1. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja :

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya Kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Perak, Kepala UPTD/B se Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Perak untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Faktor penghambat / permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja :

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.
- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai
- d. Implementasi pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa

Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan.

- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dan RB dalam menjalankan tupoksi.

2.1. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perundangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung jawab bersama.

3. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2023 berdasarkan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama tahun 2023, sesuai dengan perjanjian kinerja antara Bupati Jombang dengan Camat Perak, Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum

Pemerintah Kabupaten Jombang telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, Kecamatan Perak menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaiberikut :

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran,
Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang /Kurang	%
2	3	4	5			
Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	3,025,962,202	2,817,466,317	Sangat Menunjang	93,11%
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	6,001,500	6,001,500	Sangat menunjang	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	3 Dokumen	4,451,500	4,451,500	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 Laporan	1,550,000	1,550,000	Sangat Menunjang	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	2,506,813,032	2,362,081,364	Sangat Menunjang	94.23%
	Persentase laporan keuangan yang Tersusun sesuai aturan	100%				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang difasilitasi	20 orang/bulan	2,454,556,932	2,309,846,114	Sangat Menunjang	94.10%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Laporan penatausahaan dan verifikasi keuangan	12 Dokumen	51,206,100	51,197,500	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	1,050,000	1,037,750	Sangat Menunjang	98.83%

Program/Kegiatan/S ubKegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/S ubKegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang /Kurang	%
2	3	4	5			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	110,466,750	103,220,175	Sangat Menunjang	93.44%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 paket	19,236,500	19,205,500	Sangat Menunjang	99.84%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	1 Paket	48,400,000	41,810,000	Sangat Menunjang	86.38%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	8,990,250	8,990,250	Sangat Menunjang	100%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 dokumen	2,352,000	2,352,000	Sangat Menunjang	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	31,488,000	30,862,675	Sangat Menunjang	98.01%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	121,286,350	117,943,000	Sangat Menunjang	97.24%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	71 unit	121,286,350	117,943,000	Sangat Menunjang	97.24%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	32,295,180	27,673,944	Sangat Menunjang	85.69%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	27,924,500	27,781,221	Sangat Menunjang	99.49%
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	160,976,200	157,288,100	Sangat Menunjang	97.71%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	56,268,200	52,615,100	Sangat Menunjang	93.51%
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	180,961,870	180,260,670	Sangat Menunjang	99.61%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	24 unit	16,240,000	16,213,350	Sangat Menunjang	99.84%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85	6,526,250	6,526,250	Sangat Menunjang	100%

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	6,526,250	6,526,250	Sangat Menunjang	100%
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6,526,250	6,526,250	Sangat Menunjang	100%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	19,155,000	19,072,200	Sangat Menunjang	99.57%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%				
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 Laporan	19,155,000	19,072,200	Sangat Menunjang	99.57%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen				
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	16,510,000	16,497,200	Sangat Menunjang	99,92%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	2,645,000	2,575,000	Sangat Menunjang	97,35%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum	100%	9,314,000	9,314,000	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	9,314,000	9,314,000	Sangat Menunjang	100%
Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	9,314,000	9,314,000	Sangat Menunjang	100%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	13,066,600	13,041,600	Sangat Menunjang	99.81%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	13 desa	13,066,600	13,041,600	Sangat Menunjang	99.81%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 dokumen	13,066,600	13,041,600	Sangat Menunjang	99.81%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran	Realisasi	Menunjang/Kurang	%
2	3	4	5			
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	44,928,500	44,911,000	Sangat Menunjang	99.96%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	44,928,500	44,911,000	Sangat Menunjang	99.96%
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa				
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 lembaga	44,928,500	44,911,000	Sangat Menunjang	99.96%
JUMLAH			3,118,952,552	2.910.331.367	Sangat Menunjang	93,31%

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan hasil Analisis Pencapaian Target terhadap masing-masing sasaran secara rinci dapat diperoleh gambaran sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Sasaran
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan dengan indikator Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak dengan target tahun 2023 adalah 72 realisasi 72,61 sehingga capaian 100,8%. Program yang mendukung Sasaran I adalah :

- a. Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tercapainya target nilai AKIP Kecamatan Perak pada tahun 2023 tersebut harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi agar nilai AKIP Kecamatan Perak dapat meningkat dan mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan Perak

Program yang mendukung Sasaran II adalah :

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemeritahan Desa.
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Tidak tercapainya sasaran II Kecamatan Perak pada tahun 2023 harus menjadi perhatian bersama agar kedepannya semua stakeholder dapat

bekerja sama dan bekerja secara optimal dan professional untuk mencapai target yang telah ditentukan agar tujuan organisasi dapat tercapai.

3.2. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Perak Tahun 2023, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program, 11 kegiatan, dan 21 sub kegiatan.

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023 ini Kecamatan Perak mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3,118,952,552 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.910.331.367 atau serapan dana APBD mencapai 93,31% sehingga dapat diketahui pada tahun 2023 kondisi anggaran silpa Rp. 208.621.185 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	3,025,962,202	97,02%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	92,990,350	2,98%
		IPP Kecamatan Perak		
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait		
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu		
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu		
TOTAL			3,118,952,552	100%

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

3.2.1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	72	72,61	100,85%	3,025,962,202	2,817,466,317	93.11%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	89,95	94,39	104,94%	6,526,250	6,526,250	100%
	IPP Kecamatan Perak	3,10	2,45	79,03%			
	Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	9,314,000	9,314,000	100%
	Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	13,066,600	13,041,600	99.81%
	Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	44,928,500	44,911,000	99.96%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				97,45%	3,118,952,552	2.910.331.367	93,31%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 93,31 % telah menghasilkan kinerja sebesar 97,45 % dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar **4,14 %**.

Secara rinci pencapaian kinerja program dan anggaran Kecamatan Perak tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

SASARAN/ PROGRAM/KEGIT AN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	72	72,61	100,8%	3,025,962,202	2,817,466,317	93.11%

Program penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	3,025,962,202	2,817,466,317	93.11%
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%	6,001,500	6,001,500	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%	4,451,500	4,451,500	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 laporan	5 laporan	100%	1,550,000	1,550,000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%	2,506,813,032	2,362,081,364	94.23%
	Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%			

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Perak yang di fasilitasi	20 Orang/ bulan	20 Orang/ bulan	100%	2,454,556,932	2,309,846,114	94.10%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	100%	51,206,100	51,197,500	99.98%
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100%	100%	1,050,000	1,037,750	98.83%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	100%	110,466,750	103,220,175	93.44%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 paket	24 paket	100%	19,236,500	19,205,500	99.84%

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	48,400,000	41,810,000	86.38%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	8,990,250	8,990,000	100%
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2,352,000	2,352,000	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%	31,488,000	30,862,675	98.01%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	121,286,350	117,943,000	97.24%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	71 unit	71 unit	100%	121,286,350	117,943,000	97.24%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	27,924,500	27,781,221	99.49%
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	24 Laporan	24 Laporan	100%	27,924,500	27,781,221	99.49%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	253,470,070	249,089,120	98.27%
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	100%	56,268,200	52,615,100	93.51%
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	3 unit	3 unit	100%	16,240,000	16,213,350	99.84%

Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Perak yang dipelihara	1 unit	1 Unit	100%	180,961,870	180,260,670	99.61%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	89,95	94,39	104,94%	6,526,250	6,526,250	100%
	IPP Kecamatan Perak	3,10	2,45	79,03%			
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai PATEN Kecamatan	85,3	85	99,65%			
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%	6,526,250	6,526,250	100%
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	100%	100%	6,526,250	6,526,250	100%

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi terkait	100%	100%	100%	9,314,000	9,314,000	100%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100%	100%	100%	9,314,000	9,314,000	100%
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	12 Laporan	100%	9,314,000	9,314,000	100%

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%	13,066,600	13,041,600	99.81%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan APBDes dengan lengkap	13 Desa	13 Desa	100%	13,066,600	13,041,600	99.81%
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	26 Dokumen	100%	13,066,600	13,041,600	99.81%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	44,928,500	44,911,000	99.96%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 Lembaga	26 Lembaga	100%	44,928,500	44,911,000	99.96%

	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	13 Desa	13 Desa	100%			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	78 Lembaga	78 Lembaga	100%	44,928,500	44,911,000	99.96%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	19,155,000	19,072,200	99.57%
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 Laporan	5 Laporan	100%	19,155,000	19,072,200	99.57%
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 orang	100 orang	100%	16,510,000	16,497,200	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 dokumen	4 dokumen	100%	2,645,000	2,575,000	
RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				99,94	3,118,952,552	2,910,331,367	93.31%

3.2.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Perak sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatankualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatanpelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra 2018-2023 Kecamatan Perak yakni meningkatkan akuntabilitas dan kinerja serta meningkatkan kualitas layanan publik.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Perak melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Perak langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip :

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. **Efisien**

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

f. **Efektif**

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

g. Akuntabel

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan.

h. Terukur

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk mencapainya.

Selanjutnya untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Perak melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	100,85%	93,11 %	6,89%
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak	IKM Kecamatan Perak	104,94%	100 %	4,94%
		IPP Kecamatan Perak	79.03%	100 %	
		Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	-
		Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	99,81%	0,19%
		Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	99,96%	0,04%

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran dari sasaran pertama dan kedua. Penjelasan hasil perbandingan dari tabel diatas adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kecamatan

Dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Kecamatan Perak maka pada tahun 2023 ditetapkan target Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Perak 72 (BB) dan realisasi 72,61 (BB) sehingga capaian kinerjanya 100,8%. Untuk menjalankan sasaran I ini

Kecamatan Perak didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 3,025,962,202 dan terealisasi Rp. 2,817,466,317 (capaian 93,11%). Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 6,89%.

Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Kecamatan Perak

Dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki Kecamatan Perak maka pada tahun 2023 ditetapkan :

1. IKM Kecamatan Perak dan IPP Kecamatan Perak didukung Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp. 6,526,250 dan terealisasi Rp. 6,526,250 (capaian 100%) Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0%.
2. Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait didukung dengan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum dengan anggaran Rp. 9,314,000 dan terealisasi Rp. 9,314,000 (capaian 100%) Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0%.
3. Persentase Laporan pertanggungjawaban Realisasi APBDesa tepat waktu didukung dengan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran Rp. 13,066,600 dan terealisasi Rp. 13.041.600 (capaian 99,81%). Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0,19%.
4. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa / Perubahan APBDesa tepat waktu didukung dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp. 44,928,500 dan terealisasi Rp. 44.911.000 (capaian 99,96%). Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 0,04%.

Total Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Perak tahun 2023 didukung dengan 5 Program tersebut diatas Apabila capaian kinerja dibandingkan dengan capaian anggaran maka akan diketahui tingkat efisiensi sebesar 1.1%.

Tabel 3.12
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2023			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	72	72,61	100,8 %	19	8	42,11 %	63,16
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan laynan Kecamatan	IKM Kecamatan Perak	89,95	94,39	104,94 %	10	4	40 %	40,5
	IPP Kecamatan Perak	3,10	2,45	79 %				19,5
	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/ Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	100%	100%	100 %	7	4	57,14 %	42,86
	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	6	4	66,67 %	33,33
	Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	4	1	25 %	75
RATA - RATA CAPAIAN IKU				97,45%	RATA-RATA KETERSEDIAAN SDM		46,18 %	53,82 %

Dari tabel 3.1.1 dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 53,82 dimana dari 40 anjab ABK Kecamatan Perak ketersediaan SDM adalah 19 dengan persentase ketersediaan 46,18% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai kinerja melebihi target yaitu 97,45%

Tabel. 3.1.2

EFISIENSI SARANA DAN PRASARANA

NO	URAIAN	HASIL REKON 2023	STANDAR KEBUTUHAN	TINGKAT EFISIENSI %
1	2	3	4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	1	
2	Station Wagon	2	2	
3	Sepeda Motor	31	17	
4	Trafo Stater	1	1	
5	Scanner (Universal Tester)	1	1	
6	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	1	
7	Lemari Besi/Metal	1	1	
8	Lemari Kayu	5	5	
9	Rak Kayu	5	5	
10	Filing Cabinet Besi	4	8	0.5
11	Brandkas	1	1	
12	Lemari Sorok	2	2	
13	Lemari Kaca	2	2	
14	White Board	2	2	
15	Mesin Absensi	1	1	
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	1	
17	Papan Nama Instansi	1	1	
18	Papan Pengumuman	2	2	
19	Alat Kantor Lainnya	1	1	
20	Meja Kerja Kayu	11	11	
21	Sice	2	2	
22	Tempat Tidur Kayu	1	1	
23	Meja Resepsionis	2	2	
24	Meja Panjang	1	1	
25	Meja 1/2 Biro	22	22	
26	Kursi Rapat	205	205	
27	Kursi Tamu	1	1	
28	Kursi Putar	15	15	
29	Kursi Biasa	7	7	
30	Kursi Tunggu	7	7	
31	Kursi Lipat	51	51	
32	Meja Komputer	1	1	
33	Partisi	2	2	
34	Meubeleur lainnya	6	6	
35	Jam Elektronik	1	1	
36	A.C. Split	9	10	0.1
37	Kompore Gas (Alat Dapur)	1	1	

38	Televisi	5	5	
39	Sound System	4	4	
40	Megaphone	1	1	
41	Unit Power Supply	2	2	
42	Mimbar/Podium	1	1	
43	Gordyin/Kray	1	1	
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	1	
45	Alat Pemadam/Portable	2	2	
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	
47	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	
48	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	1	
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	2	0,5
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	8	0,875
51	Telephone Hybrid	1	1	
52	Digital LED Running Text	1	1	
53	Camera Electronic	0	0	
54	Layar Film/Projector	1	0	
55	Video Conference	1	1	
56	Laminating Module With 4 Reels	1	1	
57	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa atas lainnya (dst)	1	1	
58	P.C Unit	10	11	0,09
59	Lap Top	8	9	0,11
60	Note Book	2	2	
61	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	1	
62	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	
63	Printer (Peralatan Personal Komputer)	24	25	0,04
64	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	
65	Peralatan Komputer lainnya	1	1	
66	Peralatan Permainan lainnya	1	1	
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	2	
68	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	
69	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	
70	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1	
71	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1	1	
72	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	2	
73	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	
74	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1	
75	Pagar Permanen	1	1	
76	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1	1	
77	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	
78	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1	
79	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	
80	CCTV	1	1	
81	Mesin Nomor Antrian	1	1	
82	Dispenser	0	0	
83	Kipas Angin	0	0	
84	Kursi Roda	0	1	
TOTAL SARPRAS		504	505	
RATA-RATA TINGKAT EFISIENSI				0,002

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2023 terdapat 504 sarana dan prasarana di Kecamatan Perak sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 505 sarana prasarana jadi untuk tingkat efisiensi dalam pencapaian kinerja adalah 0,2%.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Upaya -Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan Hasil evaluasi SAKIP nomor : X.700/541/415.15/2023 tanggal 23 Agustus 2023. Kecamatan Perak memperoleh Nilai Sakip Sebesar 72,61 dengan rincian komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	25,53	85,09
2	Pengukuran Kinerja	30 %	23,58	78,61
3	Pelaporan Kinerja	15 %	6,91	46,07
4	Evaluasi Kinerja	25 %	16,59	66,38
	Total	100 %	72,61	

Dalam poin 1 s/d 4 dapat di simpulkan bahwa hasil evaluasi sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja untuk pemenuhan kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi , namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian :
 - Pada dokumen Kertas Kerja penetapan Target belum didapati perhitungan yang logis berdasarkan data yang relevan pada setiap komponen penetapan target
 - Target jangka menengah Renstra telah dimonitor pencapaiannya, namun monitoring yang dilakukan sebatas menyajikan capaian sasaran, program, kegiatan tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2023
- b. Pengukuran Kinerja untuk pemenuhan kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian :
 - Data kinerja yang dikumpulkan secara berkala untuk mengukur

capaian kinerja yang diharapkan belum relevan dengan indikator kinerja yang ditetapkan yaitu hanya sebatas pada dokumentasi dan laporan kegiatan tanpa dilengkapi tanpa dilengkapi dengan Analisa perhitungan terkait kinerja yang capai.

- Setiap pegawai telah peduli atas pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala tribulanan karena sebagai syarat pencairan TPP.
- c. Pelaporan Kinerja sebagian kecil telah terpenuhi, sehingga masih terdapat hal – hal yang perlu mendapat perhatian :
- Telah menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah, namun belum memenuhi kualitas kriteria yang di tetapkan
 - Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber dana dan sumber daya manusia, namun belum menyajikan efisiensi sumber daya atas sarana dan prasarana Dokumen Laporan Kinerja telah menyajikan upaya nyata dan/atau hambatan, namun penyajian tidak spesifik sesuai dengan capaian kinerja
 - Laporan kinerja belum dijadikan dasar untuk penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, penyesuaian aktivitas dan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi telah terpenuhi, namun masih terdapat hal hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :
- e. Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang memadai karena belum seluruh tim evaluasi internal mendapat bimbingan teknis terkait evaluasi SAKIP
- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti sehingga belum dimanfaatkan dengan maksimal dalam upaya perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja
7. Dalam rangka peningkatan nilai IKM Kecamatan Perak pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:

- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
8. Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Perak yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan :
 - Aspek pelayanan: SOP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
 - Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
 - Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/ lansia/ ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu.
 9. Dalam rangka peningkatan upaya tindaklanjut laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum akan lebih difokuskan pada peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait baik Kepolisian, Koramil, Satpol PP, BPBD dll.
 10. Dalam rangka peningkatan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Desa dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban APBDes (LRA beserta dengan Perdesnya)
 11. Dalam rangka peningkatan Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu dengan meningkatkan fasilitasi dan pembinaan Desa dalam rangka penyusunan Raperdes
 12. Dalam rangka peningkatan Indeks Reformasi Kecamatan Perak tahun berikutnya berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor: 060/11598/415.10/2023 tanggal 11 Desember 2023 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

pada Kecamatan Perak adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan Perak telah dapat mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi dengan baik, namun belum memberikan pemahaman yang holistic terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada pegawai. Selain itu, keterlibatan pimpinan pada keseluruhan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum terlihat ada langkah nyata.
- b. Belum ada upaya untuk membentuk agen perubahan dan role model di lingkungan Kecamatan Perak.
- c. Kecamatan Perak telah melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah secara periodic, namun belum ada unit/tim khusus yang melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi RB PD.
- d. Penerapan SPBE belum cukup optimal ditandai dengan hasil evaluasi penerapan SPBE yang masih pada angka 48.
- e. Belum menunjukkan Akuntabilitas Kinerja yang memuaskan ditunjukkan dengan nilai SAKIP 72,61, dimana idealnya ditandai mulai dengan terwujudnya efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis TI, serta pengukuran kinerja yang akuntabel.
- f. Belum pernah melaksanakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Upaya yang dilaksanakan baru sebatas penandatanganan komitmen/pakta integritas, sehingga indikator kegiatan utama Tingkat pembangunan ZI masih pada level 1.
- g. Pengelolaan arsip pada Kecamatan Perak telah masuk dalam kategori baik namun belum optimal, yang diukur dengan Indeks Pengawasan Kearsipan yang mencapai 58,77.
- h. Tingkat pengelolaan pengadaan belum optimal dengan nilai 77 yang diukur dari pemanfaatan Sistem Pengadaan dan Kompetensi SDM.
- i. Profesionalitas pegawai ASN yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan peraturan kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 masih dalam kategori sangat rendah pada angka 62,65.
- j. Tingkat Internalisasi Core Values ASN memiliki kecenderungan yang memadai untuk menginternalisasi nilai nilai berakhlak yang mencapai 72,93, namun mungkin memerlukan perhatian

lebih untuk meningkatkan kecenderungan ini dalam perilaku seluruh pegawai hingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan pekerjaan.

- k. Indeks Pelayanan Publik belum cukup optimal yang dibuktikan dengan nilai hasil evaluasi sebesar 2,45 dengan kategori baik, dengan catatan dimana terdapat aspek yang belum mencapai kondisi.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2023 Kecamatan Perak Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator SAKIP Kabupaten Jombang sebagai berikut :

Tabel 3.11

MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2023

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Hasil	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/Progres
1	Evaluasi atas perencanaan Kinerja agar melampirkan bukti adanya inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik.	Dilakukan Reviu Renstra berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dengan menambahkan inovasi dalam rangka peningkatan yang lebih baik	Inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu dapat memberikan upayaperbaikan yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada dokumen SOP monitoring jangka menengah, Reviu Renstra, Reviu Renstra sesuai MPH dan dokumen monitoring.	Sampai Pebruari 2024	Camat	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
2	Evaluasi atas Pengukuran Kinerja agar melampirkan data dukung yang lengkap dalam pengukuran capaian kinerja	Melakukan pengumpulan dan rekap bukti dukung yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja	Bukti dukung pengukuran kinerja telah dikumpulkan dan di upload pada google drive, hal ini bisa dilihat pada link pengumpulan bukti dukung pada google drive.	Januari 2024	Camat	Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

3	<p>Evaluasi atas Pelaporan Kinerja agar :</p> <p>l. Menyajikan informasi tentang ketidak tercapainya target yang ditetapkan dalam laporan kinerja mengenai capaian kinerja pada IPP.</p> <p>m. Dalam dokumen LkjIP menyajikan langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan IPP dalam rangka upaya untuk perbaikan.</p>	<p>Informasi tentang ketidak tercapainya target capaian kinerja IPP disajikan dalam Laporan Capaian Kinerja (LKJIP) Tahun 2023 dengan disertai langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan nilai IPP.</p>	<p>Laporan Capaian Kinerja telah disusun dan menyajikan informasi tentang ketidak tercapainya target nilai IPP Tahun 2023 yang disertai dengan langkah-langkah yang diambil untuk untuk menaikkan nilai IPP pada tahun berikutnya.</p>	<p>Sampai Pebruari 2024</p>	<p>Semua PNS Kecamatan Perak</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi</p>
4	<p>Evaluasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi agar :</p> <p>a. Menyajikan SK Tim Evaluator dan kedepan diharapkan seluruh tim telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan.</p> <p>b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam berita Acara Evaluasi dilaksanakan secara memadai yaitu dengan melihat pemenuhan dokumen, keberadaan maupun kualitas dokumen.</p>	<p>a. Dilakukan penyusunan SK Tim Evaluator dan akan mengikuti anggota Tim dalam kegiatan peningkatan kompetensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>b. Menyusun berita acara evaluasi akuntabilitas kinerja secara memadai dengan melihat pada dokumen-dokumen pendukung.</p>	<p>a. Dokumen SK Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun dilengkapi dengan bukti kompetensi anggota tim.</p> <p>b. Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah disusun berdasarkan keberadaan dan kualitas dokumen</p>	<p>Sampai Pebruari 2024</p>	<p>Semua PNS Kecamatan Perak</p>	<p>Sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi</p>

Keterangan :

13. Telah dilakukan Dilakukan Reviu Renstra berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya dengan menambahkan inovasi dalam rangka peningkatan yang lebih baik.

Hasil : - Inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu dapat memberikan upaya perbaikan yang signifikan, hal ini dapat dilihat pada dokumen SOP monitoring jangka menengah, Reviu Renstra, Reviu Renstra sesuai MPH dan dokumen monitoring.

14. Telah dilakukan pengumpulan dan rekap bukti dukung yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja.

Hasil : Bukti dukung pengukuran kinerja telah dikumpulkan dan di upload pada google drive, hal ini bisa dilihat pada link pengumpulan bukti dukung pada google drive.

15. Telah disajikan Informasi tentang ketidak tercapainya target capaian kinerja IPP disajikan dalam Laporan Capaian Kinerja (LKJIP) Tahun 2023 dengan disertai langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan nilai IPP.

Hasil : Laporan Capaian Kinerja telah disusun dan menyajikan informasi tentang ketidak tercapainya target nilai IPP Tahun 2023 yang disertai dengan langkah-langkah yang diambil untuk untuk menaikkan nilai IPP pada tahun berikutnya.

16. Telah dilakukan penyusunan SK Tim Evaluator dan akan mengikutkan anggota Tim dalam kegiatan peningkatan kompetensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berita acara evaluasi akuntabilitas kinerja secara memadai dengan melihat pada dokumen-dokumen pendukung

Hasil : Dokumen SK Tim Evaluator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah disusun dilengkapi dengan bukti kompetensi anggota tim dan Berita Acara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah disusun berdasarkan keberadaan dan kualitas dokumen.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Perak pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari s/d Desember 2023. Adapun dari hasil evaluasi pelaksanaan program kerja yang bersifat rutin sebagaimana tersebut di atas bahwa program – program kegiatan Kecamatan Perak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, anggaran yang telah direncanakan juga bisa terserap dengan baik.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti lagi untuk tahun 2023 yaitu perlu adanya tambahan personil dan peningkatan SDM personil guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian penutup dari LKjIP Kecamatan Perak Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Perak telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat baik karena pencapaian kinerjanya telah terealisasi 97,45% atas sasaran-sasarannya yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Perak Tahun 2023, dan hasilnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Kecamatan Perak tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kec. Perak	72	72,61	100,8%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Perak	89,95	94,39	104,94%
	IPP Kecamatan Perak	3,10	2,45	79,03%

Persentase laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%	100%	100%
Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian IKU			97,45%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas dan kinerja Kecamatan Perak dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Perak dengan target tahun 2023 adalah 72 dapat terealisasi 72,61 (tercapai 100,8%) berkat kerjasama dari masing-masing stakeholder dalam penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksinya.

Untuk sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator kinerja:

1. IKM Kecamatan Perak
 2. IPP Kecamatan Perak
 3. Persentase laporan pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait.
 4. Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu
 5. Persentase evaluasi Raperdes APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu
- Kurang dapat mencapai target yang ditentukan namun pencapaiannya adalah 97,45% (sangat Memuaskan). Namun demikian prestasi tersebut harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi agar sasaran strategis kecamatan dapat mencapai target yang ditentukan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak kendala dan hambatan dalam proses pencapaian target kinerja Kecamatan Perak Kabupaten Jombang sehingga ke depan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di antaranya sebagai berikut :

1. Indikator sasaran nilai evaluasi AKIP Kec. Perak, berdasarkan hasil reviu dari Inspektorat ada beberapa yang masih perlu dilakukan perbaikan untuk dokumen SAKIP untuk kedepannya yaitu:
 - Evaluasi atas perencanaan Kinerja agar melampirkan bukti adanya inovasi pada dokumen Renstra yang telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik..
 - Evaluasi atas Pengukuran Kinerja agar melampirkan data dukung yang lengkap dalam pengukuran capaian kinerja.
 - Evaluasi atas Pelaporan Kinerja agar :
 - a. Menyajikan informasi tentang ketidak tercapainya target yang ditetapkan dalam laporan kinerja mengenai capaian kinerja pada IPP.
 - b. Dalam dokumen LkjIP menyajikan langkah-langkah yang diambil untuk menaikkan IPP dalam rangka upaya untuk perbaikan.
 - Evaluasi atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi agar :
 - a. Menyajikan SK Tim Evaluator dan kedepan diharapkan seluruh tim telah memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dituangkan dalam berita Acara Evaluasi dilaksanakan secara memadai yaitu dengan melihat pemenuhan dokumen, keberadaan maupun kualitas dokumen.
2. Indikator sasaran nilai IKM, berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu pada unsur kompetensi petugas dan sarana/prasarana, maka upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan nilai IKM yaitu:
 - a. Kompetensi petugas
 - Penerapan sistem reward dan punishment khusus petugas Pelayanan untuk monitoring dan peningkatankinerja pelayanan.
 - Peningkatan budaya pelayanan dengan menyediakan segaram khusus dan mengenakan identitas nama
 - Mengikutsertakan petugas pelayanan untuk mengikuti Bimtek

pelayanan yang diadakan oleh Pemda Kab.

Jombang

b. Sarana dan Prasarana

- Direncanakan pada tahun 2024 akan dilakukan pengadaan kursi roda yang ditujukan bagi pengguna layanan yang difabel dalam rangka peningkatan kualitas sarana dan prasarana PATEN.

3. Indikator sasaran nilai IPP Kecamatan Perak akan dilakukan beberapa alternatif perbaikan atas capaian nilai IPP tahun 2023 yaitu 2,45 dari target 3,10 melalui beberapa aspek penilaian IPP yaitu:

a. Aspek Kebijakan Pelayanan

- Melibatkan unsur masyarakat dalam proses penyusunan standart pelayanan.
- Melakukan publikasi hasil SKM pada media publikasi
- melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan secara berkala melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik.

b. Aspek Profesionalisme SDM

- Penyediaan aturan SK Reward and Punishment yg beirisi kriteria pada aturan kode etik.
- Penyediaan mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

- penambahan fasilitas pendukung tempat parkir.
- penambahan sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (pengadaan kursi roda)

d. Sistem informasi Pelayanan Publik

- melakukan publikasi jenis layanan kedalam SIPPN
- mengoptimalkan penggunaan SIPP elektronik yang merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id)
- melakukan pemutakhiran data dan informasi kanal digital secara berkala

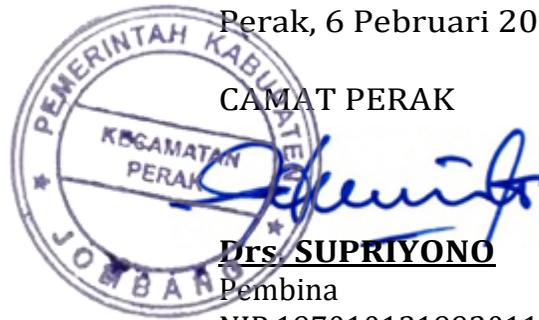
e. Konsultasi dan Pengaduan

- menampilkan dokumentasi laporan hasil konsultasi dan/atau pengaduan baik secara manual atau dapat diambilkan dari data statistik SP4N-LAPOR.
- Menampilkan bukti dukung yg sesuai dg indikator dimaksud

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Perak Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang dapat disajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Perak, 6 Pebruari 2024

CAMAT PERAK



Drs. SUPRIYONO

Pembina

NIP.197010131992011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



SEKRETARIS KECAMATAN

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, dan evaluasi .

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dalam pelaksanaan tugasnya sekretaris dibantu oleh:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, pengangkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan valuasi, mempunyai tugas:

- Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;

- Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan
- Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- Melaksanakan program kegiatan hubungan masyarakat Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik, maka berikut diuraikan rencana kinerja individu Sekretaris Kecamatan perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur	Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %
			Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 %
			Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %
			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %
			Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 %
			Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN Tepat waktu	
				100 %

			Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 %
--	--	--	---	-------

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %
		Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 %	100 %	100 %
		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN Tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100 %	100 %	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	Administrasi umum Perangkat Daerah	110,466,750	103,220,175	93.44%
		Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27,924,500	27,781,221	99.49%
		Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	100 %	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121,286,350	117,943,000	97.24%
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	100 %	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,470,070	249,089,120	98.27%
		Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja PD	100 %	100 %	100 %	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,001,500	6,001,500	100%
		Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN Tepat waktu	100 %	100 %	100 %	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,506,813,032	2,362,081,364	94.23%

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan, Semua kegiatan dapat tercapai 100 % hal ini dapat terlihat dengan :
 - a. Telah terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
 - b. Telah terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang perkantoran
 - c. Telah terlaksana kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung pelayanan , kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya berupa servis 5 laptop dan 8 AC , kegiatan pemeliharaan 8 unit kendaraan dinas dan operasional
 - d. Telah tersusun 2 dokumen perencanaan yaitu : Renja 2024, Renja perubahan 2023
 - e. Telah tersusun dokumen evaluasi kinerja yaitu : Dokumen capaian IKI tribulanan serta Dokumen LKJiP tahun 2023
 - f. Telah terlaksana pembayaran gaji dan tunjangan
 - g. Telah tersusun dokumen CaLK tahun 2023

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk tetap mengoptimalkan kegiatan dengan memperhatikan standar protocol Kesehatan
5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan telah mencapai target. Demikian halnya jika dilihat dari kinerja anggaran sebagai pendukung dengan prinsip money follows program. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya penyerapan anggaran sebesar 94.72% dari total anggaran di kesekretariatan sebesar Rp. 3,025,962,202 terserap Rp. 2,866,116,380 sehingga tercapai efisiensi sebesar 5,28%

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, administrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan **dapat dipenuhi sesuai harapan pimpinan**. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretaris Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Sekretaris Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

SEKRETARIS KECAMATAN PERAK



ABDUL WAKHID, SE

Pembina Tk. I

NIP. 196812011994031006

Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan sudah baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan supaya ditingkatkan pada tahun berikutnya



Perak, Januari 2024

CAMAT PERAK

Drs. SUPRIYONO

Pembina Tk. I

NIP.197010131992011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



KASI TATA PEMERINTAHAN

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik, maka berikut diuraikan rencana kinerja individu Kasi Tata pemerintahan Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya PATEN sesuai dengan standar	Koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai standart	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 %
		Verifikasi pelayanan adminduk sesuai aturan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100 %
		Verifikasi pengajuan perizinan sesuai aturan	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100 %
2.	Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	13 dokumen
		Pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara periodic	Jumlah kegiatan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 kegiatan

3.	Koordinasi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	Evaluasi kegiatan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	26 dokumen
		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	26 dokumen

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai standart	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %
	Verifikasi pelayanan adminduk sesuai aturan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100 %	100 %	100 %
	Verifikasi pengajuan perizinan sesuai aturan	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100 %	100 %	100 %
2.	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	13 dokumen	13 dokumen	100 %
	Pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara periodik	Jumlah kegiatan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	13 kegiatan	13 kegiatan	100 %
3.	Evaluasi kegiatan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	26 dokumen	26 dokumen	100 %
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	26 dokume n	26 dokumen	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program , kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga

akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai standart	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100 %	100 %	100 %	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,526,250	6,526,250	100 %
	Verifikasi pelayanan adminduk sesuai aturan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100 %	100 %	100 %				
	Verifikasi pengajuan perizinan sesuai aturan	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100 %	100 %	100 %				
2.	Koordinasi pertanggungjawaban realisasi APB Desa	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan APBDes	19 dokumen	19 dokumen	100 %	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13,066,600	13,041,600	99.81%
	Pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara periodik	Jumlah kegiatan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban APBDes	19 kegiatan	19 kegiatan	100 %				
3.	Evaluasi kegiatan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	38 dokumen	38 dokumen	100 %	Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13,066,600	13,041,600	99.81%
	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes secara periodik	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APB Desa	38 dokumen	38 dokumen	100 %				

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dapat tercapai 100 % hal ini dapat terlihat dengan telah terlaksana kegiatan penyelenggaraan pelayanan sesuai standart di tribulan 1 ,2 , 3 dan 4.
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terealisasi 100 % dengan telah terlaksana kegiatan verifikasi Pengajuan pelayanan adminduk tribulan sampai dengan tribulan 4 , dengan rincian 1) cetak KK sebanyak 2600 KK,2) cetak KTP & suket KTP sebanyak 2600 KTP,3) rekam KTP sebanyak 780 kegiatan rekam KTP,3) pengajuan pindah sebanyak 240 surat pindah, sedangkan untuk pelayanan non perizinan sebanyak nihil
2. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa tercapai 100 % dengan Telah tersusunnya rekomendasi hasil monev pelaksanaan APBDes semester 2 tahun 2022 dan rekomendasi hasil monev pelaksanaan APBDes semester 1 tahun 2023
 - a. Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa telah tercapai 100 % dengan Telah tersusun laporan hasil monev pelaksanaan APBDes semester 2 tahun 2022 dan laporan hasil monev pelaksanaan APBDes semester 1 tahun 2023

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.
4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk tetap mengoptimalkan kegiatan dengan memperhatikan standar protocol Kesehatan
5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja koordinasi kegiatan PATEN Kecamatan sesuai standart , verifikasi pelayanan adminduk sesuai aturan , verifikasi pengajuan perizinan sesuai aturan, evaluasi kegiatan pelaksanaan APBDes secara periodik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan APBDes secara periodic, koordinasi laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara periodic, pembinaan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes secara periodic telah mencapai target. Demikian halnya jika dilihat dari kinerja anggaran sebagai pendukung dengan prinsip money follows program. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya penyerapan anggaran sebesar 100 % pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sehingga tidak terdapat efisiensi

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Kasi tata Pemerintahan sudah terpenuhi akan tetapi masih berada di bawah ekspektasi pimpinan, sehingga **dibutuhkan perbaikan** dalam untuk meningkatkan kualitas kerjanya, dan bisa mendukung pencapaian kinerja organisasi . Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kasi Tata pemerintahan Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kasi Tata pemerintahan Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

KASI TATA PEMERINTAHAN



SANTOSA, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 196605041996021001

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja supaya diperbaiki dan ditingkatkan pada tahun berikutnya agar bisa mendukung pencapaian target kinerja organisasi

Perak, Januari 2024

CAMAT PERAK



Supriyono
Drs. SUPRIYONO

Pembina Tk. I

NIP.197010131992011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**KASI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat daerah maupun swasta;
- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik, maka berikut diuraikan rencana kinerja individu Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan raperdes sesuai aturan dan tepat waktu	Pembinaan penyusunan Raperdes APBDes/ APBDes Perubahan secara periodik	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen
		Pendampingan penyusunan Raperdes APBDes/ Raperdes Perubahan APBDesa sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang diverifikasi	26 dokumen
		Fasilitasi usulan desa dalam kegiatan musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan desa yang disetujui dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan	13 usulan
		Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan musrenbangdes tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbangdes	13 laporan
2.	Koordinasi dan pembinaan lembaga/	Pembinaan lembaga/Badan Usaha	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan	26 lembaga

	badan usaha Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Masyarakat Desa yang dibina	
		Koordinasi lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDesa
			Jumlah TP PKK Desa yang dikoordinasikan	13 TP PKK Desa

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pembinaan penyusunan Raperdes APBDes/ APBDes Perubahan secara periodik	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	26 dokumen	100 %
	Pendampingan penyusunan Raperdes APBDesa/ Raperdes Perubahan APBDesa sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang diverifikasi	26 dokumen	26 dokumen	100 %
	Fasilitasi usulan desa dalam kegiatan musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan desa yang disetujui dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan	13 usulan	13 usulan	100 %
	Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan musrenbangdes tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbangdes	13 laporan	13 laporan	100 %
2.	Pembinaan lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100 %
	Koordinasi lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	13 BUMDesa	13 BUMDesa	100 %
		Jumlah TP PKK Desa yang dikoordinasikan	13 TP PKK Desa	13 TP PKK Desa	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program , kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pembinaan penyusunan Raperdes APBDes/ APBDes Perubahan secara periodik	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	26 dokumen	26 dokumen	100 %	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	44,928,500	44,911,000	99.96%
	Pendampingan penyusunan Raperdes APBDes/ Raperdes Perubahan APBDesa sesuai aturan dan tepat waktu	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang diverifikasi	26 dokumen	26 dokumen	100 %	Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	44,928,500	44,911,000	99.96%
	Fasilitasi usulan desa dalam kegiatan musrenbang Kecamatan	Jumlah usulan desa yang disetujui dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan	13 usulan	13 usulan	100 %				
	Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan musrenbangdes tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbangdes	13 laporan	13 laporan	100 %				
3.	Pembinaan lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	26 lembaga	26 lembaga	100 %				
	Koordinasi lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan Jumlah TP PKK Desa yang dikoordinasikan	13 BUMDesa 13 TP PKK Desa	13 BUMDesa 13 TP PKK Desa	100 % 100 %				

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dapat tercapai 100 % hal ini dapat terlihat dengan telah tersusunnya Raperdes APBDes tahun 2024 dan Raperdes P-APBDes tahun 2023 tepat waktu sesuai jadwal.
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa terealisasi 100 % dengan telah terlaksana
 - Verifikasi Raperdes P- APBDes tahun 2023 dan Raperdes APBdes tahun 2024
 - Pengkoordinasian 26 Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 13 BUMDes dan 13 TP-PKK DesaBeberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:
 1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
 2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
 3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
 4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.
5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja Pembinaan penyusunan Raperdes APBDes/ APBDes Perubahan secara periodic, pendampingan penyusunan Raperdes APBDes/ Raperdes Perubahan APBDesa sesuai aturan dan tepat waktu, fasilitasi usulan desa dalam kegiatan musrenbang Kecamatan, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan musrenbangdes tepat waktu dan sesuai aturan, pembinaan lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin, koordinasi lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan secara rutin telah mencapai target. Demikian halnya jika dilihat dari kinerja anggaran sebagai pendukung dengan prinsip money follows program. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya penyerapan anggaran sebesar 100 % pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sehingga tidak terdapat efisiensi

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dipenuhi sesuai harapan pimpinan. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN PERAK



SUHEDI, S.IP

Penata Tk. I

NIP. 196701281989121000

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan pada tahun berikutnya

Perak, Januari 2024

CAMAT PERAK



Drs. SUPRIYONO

Pemula Tk. I

NIP. 197010131992011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



KASI SOSIAL DAN BUDAYA

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
 - d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
 - e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan social dan pemberdayaan perempuan;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik ,maka berikut diuraikan rencana kinerja individu Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Pelaksanaan PHBN/PHBA sesuai standart	Kegiatan PHBN/PHBA sesuai rencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	4 laporan
		Fasilitasi Kegiatan PHBN/PHBA sesuai rencana	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	4 kegiatan
2.	Koordinasi forkopimcam secara rutin berkala	Evaluasi kegiatan kordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 rekomendasi
		Pelaksanaan kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan
3.	Koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Monitoring evaluasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Jumlah laporan monitoring evaluasi kegiatan sosial budaya	4 laporan
		Koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Jumlah kegiatan koordinasi sosial budaya	4 kegiatan

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan PHBN/ PHBA sesuai rencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	4 laporan	4 laporan	100 %
	Fasilitasi Kegiatan PHBN/PHBA sesuai rencana	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %
2.	Evaluasi kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100 %
	Pelaksanaan kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100 %
3.	Monitoring evaluasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Jumlah laporan monitoring evaluasi kegiatan sosial budaya	4 laporan	4 laporan	100 %
	Koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Jumlah kegiatan koordinasi sosial budaya	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan PHBN/ PHBA sesuai rencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	4 laporan	4 laporan	100 %	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 19,155,000	Rp. 19,072,200	99.57%
	Fasilitasi Kegiatan PHBN/PHBA sesuai rencana	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %		Sub kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Rp. 16,510,000	Rp. 16,497,200
2.	Evaluasi kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Forkopimcam	4 rekomendasi	4 rekomendasi	100 %				
	Pelaksanaan kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodik	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Forkopimcam	4 laporan	4 laporan	100 %				
3.	Monitoring evaluasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Jumlah laporan monitoring evaluasi kegiatan sosial budaya	4 laporan	4 laporan	100 %	Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Rp. 2,645,000	Rp. 2,575,000	97.35%
	Koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodik	Jumlah kegiatan koordinasi sosial budaya	4 kegiatan	4 kegiatan	100 %				

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dapat tercapai 100 % hal ini dapat terlihat dengan telah terlaksananya rangkaian kegiatan peringatan isra' mi'raj pada tribulan 1, peringatan bulan ramadhan dan idulfitri pada tribulan 2, dan rangkaian pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI ke 78, peringatan natal dan tahun baru di GKJW Kecamatan Perak pada tribulan 4.

a. Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional terealisasi 100 % dengan telah terlaksananya rangkaian kegiatan peringatan isra'mi'raj pada tribulan 1, peringatan bulan ramadhan dan idulfitri pada tribulan 2, dan rangkaian pelaksanaan kegiatan peringatan HUT RI ke 78, peringatan natal dan tahun baru GKJW

b. Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan terealisasi 100 % dengan telah tersusun rekomendasi hasil koordinasi forkopimcam terkait percepatan vaksin booster pada tribulan 1, peredaran makanan dan minuman kadaluarsa menjelang idulfitri pada tribulan 2, rekomendasi atas proses penentuan komoditi bantuan sembako pada tribulan 3, himbuan pelaksanaan peringatan natal dan tahun baru dan Telah terlaksana koordinasi dan fasilitasi Penyaluran BLT BBM Tahab II, BPNT, PKH penyaluran bantuan sosial Bansos Permakanan untuk KPM Disabilitas dan lanjut Usia Keluarga tunggal se Kecamatan Perak

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparaturnya untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran

Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.
5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja kegiatan PHBN/ PHBA sesuai rencana, Fasilitasi Kegiatan PHBN/PHBA sesuai rencana, Evaluasi kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodic, pelaksanaan kegiatan koordinasi forkopimcam secara periodic, monitoring evaluasi kegiatan sosial budaya secara periodic, koordinasi kegiatan sosial budaya secara periodic telah mencapai target. Demikian halnya jika dilihat dari kinerja anggaran sebagai pendukung dengan prinsip money follows program. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya penyerapan anggaran sebesar 100 % pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional, Sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Kasi Sosial dan Budaya sudah terpenuhi akan tetapi masih berada di bawah ekspektasi pimpinan, sehingga dibutuhkan perbaikan untuk meningkatkan kualitas kinerja. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

KASI SOSIAL DAN BUDAYA KECAMATAN PERAK



DINI NURFIBRIANY, S.E., MM

Penata

NIP. 198302272011012002

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berikutnya

Perak, Januari 2024

CAMAT PERAK



Drs. SUPRIYONO

Pembina Tk. I

NIP.197010131992011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**KASI KASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik ,maka berikut diuraikan rencana kinerja individu Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi kasus pelanggaran perda/perkada dan trantibum tepat waktu	Koordinasi kasus perda/perkada dan trantibum yang telah dilaksanakan cepat dan tepat	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 dokumen
		Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	Jumlah dokumen koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	4 dokumen
		Koordinasi Kegiatan Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	Jumlah dokumen Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	12 dokumen
		Identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran	12 kegiatan

		Trantibum yang dilaksanakan	Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	
--	--	-----------------------------	---	--

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Koordinasi kasus perda/perkada dan trantibum yang telah dilaksanakan cepat dan tepat	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	Jumlah dokumen koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	4 dokumen	4 dokumen	100 %
	Koordinasi Kegiatan Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	Jumlah dokumen Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100 %
	Identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program , kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Koordinasi kasus perda/perkada dan trantibum yang telah dilaksanakan cepat dan tepat	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 dokumen	12 dokumen	100 %	Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %
	Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	Jumlah dokumen koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	4 dokumen	4 dokumen	100 %	Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %
	Koordinasi Kegiatan Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	Jumlah dokumen Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100 %				
	Identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100 %				

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dapat tercapai 100 % hal ini dapat terlihat dengan telah terlaksananya
 - Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan dengan muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat , yaitu 1) pelaksanaan mediasi terkait permasalahan perselisihan antara perguruan SH Winongo dengan Perguruan Pagarnusa
 - Telah dilaksanakan tindak lanjut atas laporan pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum peredaran makanan dan minuman kadaluarsa menjelang Idul Fitri di beberapa toko/minimarket di wilayah Kecamatan Perak. yaitu dengan melaksanakan sidak ke beberapa toko/minimarket yang ada di wilayah kecamatan perak, dan dari hasil sidak tersebut ditemukan beberapa makanan dan minuman yang telah kadaluarsa. Selanjutnya forkopimcam beserta dinas kesehatan dalam hal ini kepala puskesmas memberikan teguran dan himbauan untuk segera memusnahkan makanan dan minuman yang kadaluarsa karena tidak layak dikonsumsi dan berbahaya bagi konsumen
 - Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi laporan kejadian yaitu : Koordinasi dengan forkopimcam, pemerintahan desa dan Perguruan silat Kera Sakti dan Pagar Nusa terkait tawuran antar oknum anggota perguruan.
 - Telah tersusunnya laporan kegiatan pengkoordinasian dan penertiban terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yaitu laporan kegiatan pelaksanaan penertiban terhadap pengamen, pengemis dan reklame tidak berijin di sepanjang jl. Raya Perak Kecamatan Perak
- a. Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia terealisasi 100 % dengan telah terlaksananya
 - Pengamanan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Perak
 - Kegiatan pengamanan Kantor di lingkungan kantor kecamatan dilaksanakan dengan bergantian sesuai dengan jadwal shift Piket Kantor.

- Tersusunnya laporan pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.
5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk tetap mengoptimalkan kegiatan dengan memperhatikan standar protocol Kesehatan
6. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja Koordinasi kasus perda/perkada dan trantibum yang telah dilaksanakan cepat dan tepat, Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum, Koordinasi Kegiatan Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan, Identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan.. Demikian halnya jika dilihat dari kinerja anggaran sebagai pendukung dengan prinsip money follows program. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya penyerapan anggaran sebesar 100 % pada Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, Sub kegiatan Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah terpenuhi akan tetapi masih berada di bawah ekspektasi pimpinan, sehingga **dibutuhkan perbaikan** dalam kualitas kerjanya. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kasi Tata pemerintahan Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kasi Tata pemerintahan Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan

Perak, Januari 2024

**KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PERAK**



DWINDRA SETYO NUGROHO, S.I.P

Penata

NIP. 199109072015051000

Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan : Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan kualitas kinerjanya pada tahun berikutnya

Perak, Januari 2024

CAMAT PERAK



Drs. SUPRIYONO

Pembina Tk. I

NIP.197010131992011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasubag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian.
2. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan
3. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
4. Menyiapkan, Menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan.
5. Menghimpun data asset dan melaksanakan ketaausahaan barang;
6. Mengkoordinasikan dan mneyusun standart operasional prosedur dan standart pelayanan minimal
7. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi
8. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik ,maka berikut diuraikan rencana kinerja individu Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, adminstrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan	fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket
		Pemenuhan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen
		penyusunan Laporan hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan

	fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	10 unit
	Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarna gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara	8 unit
	fasilitasi pemeliharaan kendaraan Operasional / lapangan dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara	10 unit
	fasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan aturan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / lapangan yang dibayarkan pajaknya	10 unit
	fasilitasi Peningkatan kebersihan lingkungan kantor	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen
	fasilitasi dokumentasi kegiatan kecamatan dengan baik	Jumlah dokumen Kehumasan, Publikasi dan dokumentasi kegiatan kantor	12 dokumen

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket	24 Paket	100 %
	Pemenuhan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %
	pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	penyusunan Laporan hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100 %

fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	100 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	10 unit	10 unit	100 %
Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarna gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	100 %
fasilitasi pemeliharaan kendaraan Operasional / lapangan dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	100 %
fasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan aturan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / lapangan yang dibayarkan pajaknya	10 unit	10 unit	100 %
fasilitasi Peningkatan kebersihan lingkungan kantor	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100 %
fasilitasi dokumentasi kegiatan kecamatan dengan baik	Jumlah dokumen Kehumasan, Publikasi dan dokumentasi kegiatan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	24 Paket	24 Paket	100 %	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19,236,500	19,205,500	99.84%
	Pemenuhan Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8,990,250	8,990,000	100%
	memenuhi bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin	Jumlah pemenuhan bahan bacaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48,400,000	41,810,000	86.38%
	penyusunan Laporan hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100 %	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,352,000	2,352,000	100%
	fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Laporan	24 Laporan	100 %	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31,488,000	30,862,675	98.01%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	10 unit	10 unit	100 %	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	121,286,350	117,943,000	97.24%
	Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara	8 unit	8 unit	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	27,924,500	27,781,221	99.49%
fasilitasi pemeliharaan kendaraan Operasional / lapangan dengan baik	Jumlah Kendaraan Dinas operasional / lapangan yang dipelihara	10 unit	10 unit	100 %	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	16,240,000	16,213,350	99.84%	

fasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan aturan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / lapangan yang dibayarkan pajaknya	10 unit	10 unit	100 %	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.268,200	52.615,100	93.51%
fasilitasi Peningkatan kebersihan lingkungan kantor	Jumlah dokumen penyelenggaraan kegiatan kebersihan lingkungan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100 %	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180,961,870	180,260,670	99.61%
fasilitasi dokumentasi kegiatan kecamatan dengan baik	Jumlah dokumen Kehumasan, Publikasi dan dokumentasi kegiatan kantor	12 dokumen	12 dokumen	100 %				

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan dapat tercapai 100 % hal ini dapat terlihat dengan telah terlaksananya pemenuhan belanja alat tulis kantor serta alat kebersihan dan bahan pembersih tribulan 1, 2, 3 dan 4.
2. Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah dilaksanakan pemenuhan belanja kebutuhan barang cetak dan penggandaan tribulan tribulan 1, 2, 3 dan 4
3. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah dilaksanakan pemenuhan belanja surat kabar tribulan 1, 2, 3 dan 4
4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah tersusun administrasi perjalanan dinas luar daerah tribulan tribulan 1, 2, 3 dan 4
5. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah dilaksanakan pemenuhan belanja penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor tribulan tribulan 1, 2, 3 dan 4
6. Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah terlaksananya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana gedung kantor yaitu 1 unit komputer set dan 1 unit printer
7. Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah terlaksananya pemenuhan tagihan listrik dan telpon tribulan 1, 2, 3 dan 4
8. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor tribulan tribulan 1, 2, 3 dan 4 (8 AC, 5 Komputer dan 8 Laptop)
9. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah terlaksananya pemeliharaan/ rehap atap gedung kantor pada tribulan 4
10. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah terlaksananya pemenuhan belanja BBM, Pelumas, Belanja suku cadang dan untuk 2 unit mobil dinas dan

pembayaran pajak kendaraan dinas operasional/ lapangan untuk 4 unit sepeda motor dan 2 unit mobil dinas.

11. Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas harian beserta atribut kelengkapannya telah tercapai realisasi 100 % dengan Telah terlaksananya pengadaan pakaian dinas harian bagi 20 orang ASN

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.
5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja fasilitasi peralatan dan perlengkapan kantor efektif dan efisien, pemenuhan barang cetakan sesuai kebutuhan, pemenuhan barang penggandaan sesuai kebutuhan, pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara rutin, Penyusunan Laporan hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang tersusun sesuai aturan, fasilitasi komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan, Pemenuhan jenis Pelayanan Umum sesuai kategori, fasilitasi jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik tepat waktu, Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien, Sarana dan Prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang terpelihara dengan baik, , fasilitasi pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya PD, fasilitasi pemeliharaan kendaraan Operasional / lapangan dengan baik, fasilitasi pembayaran pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan tepat waktu sesuai dengan ketentuan aturan, fasilitasi Peningkatan kebersihan lingkungan kantor, fasilitasi dokumentasi kegiatan kecamatan dengan baik , Penyediaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya sesuai kebutuhan telah mencapai target. Demikian halnya jika dilihat dari kinerja anggaran sebagai pendukung dengan prinsip money follows program. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya penyerapan anggaran sebesar 100 % pada Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, Sub kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya, Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaran dinas operasional atau lapangan, Sub kegiatan Pengadaan pakaian dinas harian beserta atribut kelengkapannya terserap sebesar 97%.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian sudah terpenuhi akan tetapi masih berada di bawah ekspektasi pimpinan, sehingga **dibutuhkan perbaikan** dalam peningkatan kualitas kerjanya. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja

selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PERAK**



IDA AYU NURSANTI, S.E.

Penata Tk. I

NIP. 198012042006042000

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

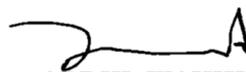
Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan pada tahun berikutnya

Perak, Januari 2024

SEKRETARIS KECAMATAN PERAK



ABDUL WAKHID, SE

Pembina Tk. I

NIP. 196812011994031006

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**KASUBAG KEUANGAN,
PENYUSUNAN PROGRAM DAN
EVALUASI**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai tugas pokok :

1. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka Panjang, jangka menengah serta tahunan
2. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka Panjang, jangka menengah serta tahunan
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
4. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan
5. Menghimpun data dan Menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan.
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan.
7. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan.
8. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik, maka berikut diuraikan rencana kinerja individu Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Kegiatan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, adminstrasi umum, pengadaan, penyediaan jasa dan pemeliharaan yang terlaksana sesuai dengan aturan	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen
		Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	5 Dokumen
		Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan
		Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen

		Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Perak yang difasilitasi	14 Bulan
--	--	---	--	----------

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %
	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %
	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100 %
	Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Perak yang difasilitasi	14 Bulan	14 Bulan	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,451,500	4,451,500	100
	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,550,000	1,550,000	100
	Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100 %	Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	51,206,100	51,197,500	99,98
	Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah Dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,454,556,932	2,309,846,114	94,10
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Perak yang difasilitasi	14 Bulan	14 Bulan	100 %	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1,050,000	1,037,750	98,83

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan dapat tercapai 100 % hal ini dapat terlihat dengan telah tersusunnya dokumen renja tahun 2024 dan dokumen renja perubahan tahun 2023
2. Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan tercapai 100 % dengan tersusunnya LKJiP tahun 2022 serta dokumen BA capaian IKI beserta dokumen pendukung kinerja masing- masing individu tribulan 1, 2, 3 dan 4 tahun 2023
3. Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel telah tercapai 100 % dengan telah tersusunnya dokumen SK Camat tentang pengelola keuangan kecamatan perak, serta telah dilaksanakannya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD tribulan 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan aturan
4. Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan telah tercapai 100 % dengan telah tersusunnya dokumen CaLK tahun anggaran 2022 sesuai dengan aturan
5. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu telah tercapai 100 % dengan terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan masing- masing pegawai alokasi tribulan 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.

2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.
5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah sesuai aturan, Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan, Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel, Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan, Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu, Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu telah mencapai target. Demikian halnya jika dilihat dari kinerja anggaran sebagai pendukung dengan prinsip money follows program. Hal ini dapat dilihat dengan tercapainya penyerapan anggaran sebesar 100 % pada Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD , Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD , Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN , Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD terserap sebesar 94,24 %.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi **dapat dipenuhi sesuai harapan pimpinan**. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi Kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kasubag Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

**KASUBAG KEUANGAN, PENYUSUNAN
PROGRAM DAN EVALUASI**



BAGUS RACHMAT, S.IP

Penata Muda Tk.I

NIP. 198509282005011001

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

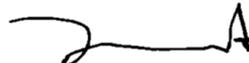
Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan pada tahun berikutnya

Perak, Januari 2024

SEKRETARIS KECAMATAN PERAK



ABDUL WAKHID, SE

Pembina Tk. I

NIP. 196812011994031006

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PETUGAS KEAMANAN
(SETYA BUDI)**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Petugas keamanan selaku Staf kasi trantib Kecamatan perak mempunyai tugas:

1. Melaksanakan piket jaga pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2. Melaksanakan pengamanan setiap kegiatan kecamatan dan desa
3. Membuat laporan Kejadian
4. Melaksanakan penertiban PKL (Penegakan perda)
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik ,maka berikut diuraikan rencana kinerja individu dari petugas keamanan untuk mendukung pencapaian hasil kerja dari atasan langsungnya yaitu Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan
2.	Koordinasi Kegiatan Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan	16 kegiatan	100 %
2.	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan	64 kegiatan	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program , kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan	16 kegiatan	100 %	Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %
2.	Kegiatan Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan	64 kegiatan	100 %	Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan kegiatan patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum antara lain :
 - patroli gabungan pengamanan natal 2023 dan tahun baru 2024
 - patroli gabungan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah kecamatan perak,
 - Patroli gabungan pelaksanaan operasi pasar dengan tujuan mengetahui dan mengendalikan kenaikan harga sembako di pasar lokal yang ada di wilayah Kecamatan Perak
 - patroli gabungan pengamanan malam natal 2023 dan tahun baru 2024.
 - patroli gabungan pemantauan kelangkaan minyak goreng
2. Telah terlaksanana kegiatan piket keamanan kantor setiap bulan dengan baik dan bertanggungjawab.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

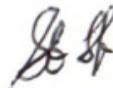
BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum, Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab merupakan pendistribusian dari rencana kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Petugas Keamanan sudah terpenuhi akan tetapi masih berada di bawah ekspektasi pimpinan, sehingga **dibutuhkan perbaikan** dalam peningkatan kualitas kinerjanya. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kecamatan Perak ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Petugas Keamanan Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

**PETUGAS KEAMANAN
KECAMATAN PERAK**



SETYA BUDI

PENGATUR TK I

NIP. 19660910 199003 1 009

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan pada tahun berikutnya agar dapat mendukung capaian kinerja atasan dan organisasi

Perak, Januari 2024

**KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PERAK**



DWINDRA SETYO NUGROHO, S.I.P

Penata

NIP. 199109072015051001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PETUGAS KEAMANAN
(IRFAN YUDIANTO)**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Petugas keamanan selaku Staf kasi trantib Kecamatan perak mempunyai tugas:

1. Melaksanakan piket jaga pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2. Melaksanakan pengamanan setiap kegiatan kecamatan dan desa
3. Membuat laporan Kejadian
4. Melaksanakan penertiban PKL (Penegakan perda)
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik, maka berikut diuraikan rencana kinerja individu dari petugas keamanan untuk mendukung pencapaian hasil kerja dari atasan langsungnya yaitu Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan
2.	Koordinasi Kegiatan Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan	16 kegiatan	100 %
2.	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan	64 kegiatan	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program , kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan	16 kegiatan	100 %	Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %
2.	Kegiatan Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan	64 kegiatan	100 %	Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan kegiatan patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum antara lain :
 - patroli gabungan pengamanan natal 2023 dan tahun baru 2024
 - patroli gabungan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah kecamatan perak,
 - Patroli gabungan pelaksanaan operasi pasar dengan tujuan mengetahui dan mengendalikan kenaikan harga sembako di pasar lokal yang ada di wilayah Kecamatan Perak
 - patroli gabungan pengamanan malam natal 2023 dan tahun baru 2024.
 - patroli gabungan pemantauan kelangkaan minyak goreng
2. Telah terlaksanana kegiatan piket keamanan kantor setiap bulan dengan baik dan bertanggungjawab.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum, Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab merupakan pendistribusian dari rencana kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Petugas Keamanan sudah terpenuhi akan tetapi masih berada di bawah ekspektasi pimpinan, sehingga **dibutuhkan perbaikan** dalam peningkatan kualitas kinerjanya. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kecamatan Perak ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Petugas Keamanan Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

**PETUGAS KEAMANAN
KECAMATAN PERAK**


IRFAN YUDIANTO
PENGATUR

NIP. 196911242009061002

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan pada tahun berikutnya agar dapat mendukung capaian kinerja atasan dan organisasi

Perak, Januari 2024

**KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PERAK**



DWINDRA SETYO NUGROHO, S.I.P

Penata

NIP. 199109072015051001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PETUGAS KEAMANAN
(SLAMET)**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Petugas keamanan selaku Staf kasi trantib Kecamatan perak mempunyai tugas:

1. Melaksanakan piket jaga pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
2. Melaksanakan pengamanan setiap kegiatan kecamatan dan desa
3. Membuat laporan Kejadian
4. Melaksanakan penertiban PKL (Penegakan perda)
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 Rencana Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Suatu organisasi tidak akan dapat mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya keterlibatan peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi tersebut.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang harus dicapai setiap tahun, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan suatu instrument untuk memastikan dan memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi, yang merupakan satu kesatuan arah kebijakan pengelolaan kinerja individu yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas Pegawai dengan semangat memperkuat peran pimpinan dan membangun kebersamaan dan kolaborasi antar Pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam rangka mendukung tujuan OPD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dan Meningkatkan kualitas layanan publik, maka berikut diuraikan rencana kinerja individu dari petugas keamanan untuk mendukung pencapaian hasil kerja dari atasan langsungnya yaitu Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Perak yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai Matriks Pembagian Peran dan Hasil pada Kecamatan Perak :

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencegahan dini pelanggaran Perda/Perkada dan gangguan Trantibum	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan
2.	Koordinasi Kegiatan Pengamanan Kantor dan kegiatan-kegiatan di lingkungan Kantor Kecamatan	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan

2.2 Capaian Kinerja

Capaian Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berikut realisasi target kinerja yang telah ditetapkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen pengukuran kinerja :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan	16 kegiatan	100 %
2.	Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan	64 kegiatan	100 %

2.3 Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka disusunlah suatu dokumen perencanaan. Rencana kerja meliputi strategi, arah kebijakan, program , kegiatan dan subkegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Adapun dokumen rencana kerja yang disusun oleh kecamatan Perak meliputi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan/atau SKP haruslah selaras dengan dokumen perencanaan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa indikator program, kegiatan dan subkegiatan telah dapat terukur atau ada individu pegawai yang bertanggungjawab atasnya. Selain itu juga akan dapat terlihat sejauh mana realisasi anggaran yang tersedia. Apakah akan linear dengan realisasi kinerja ataukah sebaliknya.

Berikut diuraikan keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan :

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	Jumlah Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum	16 kegiatan	16 kegiatan	100 %	Kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %
2.	Kegiatan Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab	Jumlah kegiatan piket keamanan kantor	64 kegiatan	64 kegiatan	100 %	Sub kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Rp. 9,314,000	Rp. 9,314,000	100 %

2.4. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian rencana kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan kegiatan patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum antara lain :
 - patroli gabungan pengamanan natal 2023 dan tahun baru 2024
 - patroli gabungan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah kecamatan perak,
 - Patroli gabungan pelaksanaan operasi pasar dengan tujuan mengetahui dan mengendalikan kenaikan harga sembako di pasar lokal yang ada di wilayah Kecamatan Perak
 - patroli gabungan pengamanan malam natal 2023 dan tahun baru 2024.
 - patroli gabungan pemantauan kelangkaan minyak goreng
2. Telah terlaksanana kegiatan piket keamanan kantor setiap bulan dengan baik dan bertanggungjawab.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

1. Adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja dan kegiatan.
2. Adanya SOP pada masing-masing kegiatan
3. Dilaksanakan monitoring pada seluruh kegiatan secara rutin.
4. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Meskipun secara keseluruhan kinerja individu dapat terealisasi sebesar 100 % sesuai dengan target yang tercantum pada dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), tapi masih diperlukan beberapa perbaikan agar dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kedepannya :

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait guna meningkatkan sinergitas pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Perak
3. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
4. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

5. Mengoptimalkan kinerja dengan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor yang ada.

BAB III PENUTUP

Pencapaian rencana kinerja Kegiatan Patroli bersama instansi terkait dalam rangka pencegahan gangguan trantibum, Kegiatan Piket Keamanan kantor dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab merupakan pendistribusian dari rencana kinerja Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap rencana kinerja Petugas Keamanan sudah terpenuhi akan tetapi masih berada di bawah ekspektasi pimpinan, sehingga **dibutuhkan perbaikan** dalam peningkatan kualitas kinerjanya. Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak, serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Petugas Keamanan Kecamatan Perak ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Petugas Keamanan Kecamatan Perak dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Perak kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Perak, Januari 2024

**PETUGAS KEAMANAN
KECAMATAN PERAK**



SLAMET

PENGATUR TK.I

NIP. 196703232008011009

Tanggapan Atasan Langsung

Laporan sudah baik

Laporan kurang baik

Laporan diperbaiki/ direvisi

Catatan :

Capaian kinerja sudah baik dan supaya dipertahankan, dan ditingkatkan pada tahun berikutnya agar dapat mendukung capaian kinerja atasan dan organisasi

Perak, Januari 2024

**KASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PERAK**



DWINDRA SETYO NUGROHO, S.I.P

Penata

NIP. 199109072015051001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PENGELOLA DATA
(AHMAD SHOLI)**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Pengelola Data selaku staf Kasi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas

- a. Mengadministrasi dan mengarsipkan dokumen pengurusan perizinan / non perizinan, dispensasi nikah, SKCK
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kasi Tata Pemerintahan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan

maka Pengelola Data Kecamatan Perak berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No .	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif	Fasilitasi pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll (diluar adminduk)	Persentase pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll yang diproses	100%

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2022 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Fasilitasi pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll (diluar adminduk)	Persentase pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll yang diproses	100%	120%	120%

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No .	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1	Fasilitasi pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll (diluar adminduk)	Persentase pengajuan perizinan/ non perizinan dispensasi nikah, skck dll yang diproses	100%	120%	120%	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,526,250	6,526,250	100
						Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,526,250	6,526,250	100

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Terdapat 1232 Pengajuan perizinan / non perizinan, dispensasi nikah, SKCK yang di proses dari target 1000, sehingga tercapai 120%

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan
- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

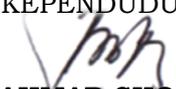
BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja Rencana Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Perak, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja individu tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024

PENGADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN



AHMAD SHOLI

Penata Muda
NIP. 196808122006041007

3 Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki / revisi

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Jombang, Januari 2024

KASI TATA PEMERINTAHAN



SANTOSA, S.SoS

Penata Tk.I
NIP. 196605041996021001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PENGELOLA SISTEM
INFORMASI
KEPENDUDUKAN**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Pengelola Data selaku staf Kasi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas

- a. Memfasilitasi penerimaan dokumen pengajuan KK sesuai prosedur SOP
- b. Memfasilitasi penerimaan dokumen pengajuan KTP sesuai prosedur SOP
- c. Memfasilitasi penerimaan dokumen permohonan rekam sesuai prosedur SOP
- d. Memfasilitasi penerimaan dokumen pengajuan pindah sesuai prosedur SOP
- e. Memfasilitasi pengumpulan laporan kependudukan dari desa secara periodik
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Kasi Tata Pemerintahan

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan

maka Pengelola Data Kecamatan Perak berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif	Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan KK sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan KK yang diverifikasi	100%
		Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan KTP sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan KTP yang diverifikasi	100%
		Fasilitasi penerimaan dokumen permohonan rekam sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen permohonan rekam yang diverifikasi	100%
		Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan pindah sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan pindah yang diverifikasi	100%
		Fasilitasi pengumpulan laporan kependudukan dari desa secara periodik	Persentase pengumpulan laporan kependudukan yang diterima	100%

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan KK sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan KK yang diverifikasi	100%	100%	100%
	Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan	Persentase penerimaan dokumen	100%	100%	100%

	KTP sesuai prosedur SOP	pengajuan KTP yang diverifikasi			
	Fasilitasi penerimaan dokumen permohonan rekam sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen permohonan rekam yang diverifikasi	100%	100%	100%
	Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan pindah sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan pindah yang diverifikasi	100%	100%	100%
	Fasilitasi pengumpulan laporan kependudukan dari desa secara periodik	Persentase pengumpulan laporan kependudukan yang diterima	100%	100%	100%

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1	Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan KK sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan KK yang diverifikasi	100%	100%	100%	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,526,250	6,526,250	100
	Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan KTP sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan KTP yang diverifikasi	100%	100%	100%	Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,526,250	6,526,250	100
	Fasilitasi penerimaan dokumen permohonan rekam sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen permohonan rekam yang diverifikasi	100%	100%	100%				
	Fasilitasi penerimaan dokumen pengajuan pindah sesuai prosedur SOP	Persentase penerimaan dokumen pengajuan pindah yang diverifikasi	100%	100%	100%				
	Fasilitasi pengumpulan laporan kependudukan dari desa secara periodik	Persentase pengumpulan laporan kependudukan yang diterima	100%	100%	100%				

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa telah terlaksana kegiatan Pengajuan pelayanan adminduk tribulan 1 sampai dengan tribulan 4 , dengan rincian

1. cetak KK sebanyak 2600 KK.
2. cetak KTP & suket KTP sebanyak 2600 KTP.
3. rekam KTP sebanyak 780 kegiatan rekam KTP sehingga tercapai 100%

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan
- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja Rencana Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Perak, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja individu tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024

PENGADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN



YUNI SUSILAWATI

Penata Muda

NIP. 19790626 2010012 001

3 Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki / revisi

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Jombang, Januari 2024

KASI TATA PEMERINTAHAN



SANTOSA, S.SoS

Penata Tk.I

NIP. 196605041996021001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PENGELOLA ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Pengelola Administrasi Pemerintahan selaku staf Kasi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas

- a. Melakukan Rekapitulasi laporan pendayagunaan aset desa sesuai aturan
- b. Melaksanakan Rekapitulasi laporan pengelolaan keuangan Desa secara akurat

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan

maka Pengelola Data Kecamatan Perak berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No .	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan yang efektif	Rekapitulasi laporan pendayagunaan aset desa sesuai aturan	Jumlah laporan rekapitulasi pendayagunaan aset desa yang tersusun	13 Dokumen
		Rekapitulasi laporan pengelolaan keuangan Desa secara akurat	Jumlah laporan rekapitulasi pengelolaan keuangan desa yang tersusun	13 Dokumen

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

No .	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Rekapitulasi laporan pendayagunaan aset desa sesuai aturan	Jumlah laporan rekapitulasi pendayagunaan aset desa yang tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen
	Rekapitulasi laporan pengelolaan keuangan Desa secara akurat	Jumlah laporan rekapitulasi pengelolaan keuangan desa yang tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1	Rekapitulasi laporan pendayagunaan aset desa sesuai aturan	Jumlah laporan rekapitulasi pendayagunaan aset desa yang tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,526,250	6,526,250	100

	Rekapitulasi laporan pengelolaan keuangan Desa secara akurat	Jumlah laporan rekapitulasi pengelolaan keuangan desa yang tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	Sub kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6,526,250	6,526,250	100
--	--	---	------------	------------	------------	---	-----------	-----------	-----

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa telah terlaksana kegiatan Pengajuan pelayanan adminduk tribulan 1 sampai dengan tribulan 4 , dengan rincian

1. Jumlah laporan rekapitulasi pendayagunaan aset desa yang tersusun sebanyak 13 dokumen.
2. Jumlah laporan rekapitulasi pengelolaan keuangan desa yang tersusun sebanyak 13 dokumen.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan
- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja Rencana Kinerja Sasaran Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Tingkat Kecamatan Kecamatan Perak, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja individu tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024

PENGELOLA ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN



TITIK ZAKIYAH, S.E

Penata Muda

NIP. 19680110201001 2 001

3 Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki / revisi

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Jombang, Januari 2024

KASI TATA PEMERINTAHAN



SANTOSA, S.SoS

Penata Tk.I

NIP. 196605041996021001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PENGADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasubag Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Pengadministrasi Kepegawaian selaku staf Kasubag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, meneliti dan memproses Dokumen Kepegawaian perorangan yang mengalami perubahan / penambahan
- b. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan perubahan data perorangan guna mengetahui posisi pegawai yang bersangkutan
- c. Menyiapkan, Menghimpun dan merekap daftar hadir pegawai di Lingkungan Kecamatan, untuk mengetahui kehadiran tiap pegawai
- d. Membuat laporan tentang kehadiran pegawai guna menunjang administrasi tertib pegawai

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Bareng dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah

2. Pemenuhan jenis pelayanan Umum sesuai kategori

maka Pengadministrasi Kepegawaian Kecamatan Bareng berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pemenuhan jenis pelayanan Umum sesuai kategori	Pengelolaan absensi Pegawai secara berkala	Jumlah laporan absensi Pegawai yang tersusun	12 Laporan
		Kegiatan mengarsipkan dokumen kepegawaian (cuti, KP4, KB, KGB, dll) secara periodik	Jumlah laporan dokumen kepegawaian yang tersusun	4 Dokumen

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengelolaan absensi Pegawai secara berkala	Jumlah laporan absensi Pegawai yang tersusun	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	Kegiatan mengarsipkan dokumen kepegawaian (cuti, KP4, KB, KGB, dll) secara periodik	Jumlah laporan dokumen kepegawaian yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan absensi Pegawai secara berkala	Jumlah laporan absensi Pegawai	12 Laporan	12 Laporan	100%				

		yang tersusun							
2.	Kegiatan mengarsipkan dokumen kepegawaian (cuti, KP4, KB, KGB, dll) secara periodik	Jumlah laporan dokumen kepegawaian yang tersusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%				

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah laporan absensi Pegawai yang tersusun sejumlah 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Jumlah laporan dokumen kepegawaian yang tersusun sejumlah 4 Dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023;
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan
- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

Akan tetapi walaupun pencapaian target Rencana Kinerja tercapai 100% masih terdapat pula kendala maupun tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- a. Kurang kompetennya SDM aparatur
- b. Masih terdapat kurangnya pemahaman tupoksi masing-masing baik dari pejabat maupun staf.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.

2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja sasaran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Bareng, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024

PENGADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN



AMBAR SULISTYOWATI
Pengatur Tingkat I
NIP. 197806012009012002

3 Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki / revisi

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Perak, Januari 2024

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PERAK**



IDA AYU NURSANTI, S.E.

Penata Tk. I
NIP. 198012042006042000

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



PRAMU KEBERSIHAN

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasubag Umum mempunyai tugas pokok :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian, dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan kecamatan;
- e. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- f. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Pramu Kebersihan selaku staf Kasubag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan alat kebersihan dan bahan pembersih dengan baik
- b. Pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor secara rutin
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dikelola
2. Jumlah kegiatan membersihkan dan memelihara lingkungan kantor yang dilaksanakan

maka Pengadministrasi Kepegawaian Kecamatan Perak berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pemenuhan jenis pelayanan Umum sesuai kategori	Pengelolaan alat kebersihan dan bahan pembersih dengan baik	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dikelola	12 Laporan
		Pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor secara rutin	Jumlah kegiatan membersihkan dan memelihara lingkungan kantor yang dilaksanakan	12 bulan

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengelolaan alat kebersihan dan bahan pembersih dengan baik	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dikelola	12 Laporan	12 Laporan	100%
2.	Pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor secara rutin	Jumlah kegiatan membersihkan dan memelihara lingkungan kantor yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100%

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan alat kebersihan dan bahan pembersih dengan baik	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dikelola	12 Laporan	12 Laporan	100%				
2.	Pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor secara rutin	Jumlah kegiatan membersihkan dan memelihara lingkungan kantor yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	100%				

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang dikelola tersusun sejumlah 12 Laporan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Jumlah kegiatan membersihkan dan memelihara lingkungan kantor telah dilaksanakan selama 12 bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023;
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan
- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

Akan tetapi walaupun pencapaian target Rencana Kinerja tercapai 100% masih terdapat pula kendala maupun tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

- a. Kurang kompetennya SDM aparatur
- b. Masih terdapat kurangnya pemahaman tupoksi masing-masing baik dari pejabat maupun staf.

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja sasaran Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Perak, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja program tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024

PRAMU KEBERSIHAN



NUR CHOLIS

Pengatur Muda

NIP. 196706072007011026

3 Tanggapan Atasan Langsung

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki / revisi

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Perak, Januari 2024

**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PERAK**



IDA AYU NURSANTI, S.E.

Penata Tk. I

NIP. 198012042006042000

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



BENDAHARA

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas pokok :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Bendahara sekaku staf Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi, mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pengeluaran sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- b. Membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk diproses lebih lanjut;
- c. Menghimpun bukti-bukti transaksi pengeluaran dan menandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka tertib administrasi;
- d. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. Menyusun laporan realisasi keuangan tiap bulan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. Mencatat Transaksi yang belum di Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ke dalam buku panjar dalam rangka tertib administrasi;
- g. Melaksanakan pembayaran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Bareng dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu
3. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel
4. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

maka Bendahara Kecamatan Bareng berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang tersusun	14 Bulan
2	Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel	Penyusunan dokumen penatausahaan keuangan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang disusun	4 Dokumen
3	Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Dokumen penyusunan Dokumen laporan keuangan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan yang dikelola	18 Dokumen

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang tersusun	14 Bulan	14 Bulan	100%

2.	Penyusunan dokumen penatausahaan keuangan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
3.	Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Dokumen penyusunan Dokumen laporan keuangan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan yang dikelola	18 Dokumen	18 Dokumen	100%

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1	Fasilitasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang tersusun	14 Bulan	14 Bulan	100%	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,454,556,932	2,309,846,114	94,10
2	Penyusunan dokumen penatausahaan keuangan tepat waktu dan sesuai aturan	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sub kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	51,206,100	51,197,500	99,98
3	Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Dokumen penyusunan Dokumen laporan keuangan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1,050,000	1,037,750	98,83

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang tersusun sejumlah 14 Bulan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
2. Jumlah dokumen penatausahaan keuangan yang disusun sejumlah 4 Dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan
3. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan yang dikelola sejumlah 1 Dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);

- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan
- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja sasaran Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu , Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel, Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Kecamatan Bareng, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja individu tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024

BENDAHARA



SAIFUDDIN ZUHRI, S.E.

Penata Muda

NIP. 197303082009061001

3 Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki / revisi |

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Jombang, Januari 2024

KASUBAG KEUANGAN,
PENYUSUNAN PROGRAM
DAN EVALUASI



BAGUS RACHMAT, S.IP

Penata Muda Tk. I

NIP. 198509282005011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PENGADMINISTRASI
KEUANGAN**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas pokok :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Pengadministrasi Keuangan selaku staf Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi, mempunyai tugas antara lain :

- a. Membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi sesuai aturan
- b. Membuat Laporan Realisasi Anggaran yang diadministrasi sesuai aturan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Terlaksananya Administrasi Laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan
2. Terlaksananya Administrasi Laporan Realisasi Anggaran sesuai aturan.

maka Pengadministrasi Keuangan Kecamatan Perak berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan Dokumen laporan keuangan tahunan tepat waktu dan sesuai aturan	Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi sesuai aturan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi	12 Kali
		Laporan Realisasi Anggaran yang diadministrasi sesuai aturan	Jumlah Realisasi Anggaran yang diadministrasi	4 Kali

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO.	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi sesuai aturan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi	12 Kali	12 Kali	100%
2.	Laporan Realisasi Anggaran yang diadministrasi sesuai aturan	Jumlah Realisasi Anggaran yang diadministrasi	4 Kali	4 Kali	100%

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1	Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi sesuai aturan	Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi	12 Kali	12 Kali	100%	Sub kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1,050,000	1,037,750	98,83
2	Laporan Realisasi Anggaran yang diadministrasi sesuai aturan	Jumlah Realisasi Anggaran yang diadministrasi	4 Kali	4 Kali	100%				

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan pertanggungjawaban keuangan yang diadministrasi sejumlah 12 kali.
2. Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan yang dikelola sejumlah 4 kali.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan
- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparatur untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

3. Meningkatkan pembinaan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja sasaran Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu , Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel, Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Kecamatan Perak, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja individu tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024

PENGADMINISTRASI
KEUANGAN



CHOLILUL UZAIR

Pengatur Tingkat I
NIP. 197410242010011004

3 Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki / revisi |

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Jombang, Januari 2024

KASUBAG KEUANGAN,
PENYUSUNAN PROGRAM
DAN EVALUASI



BAGUS RACHMAT, S.IP

Penata Muda Tk. I
NIP. 198509282005011001

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2023**



**PENGELOLA PROGRAM DAN
LAPORAN**

**KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 59 tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang dijabarkan bahwa Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas pokok :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dan untuk mendukung tupoksi tersebut maka Pengelola Program dan Laporan sekaku staf Kasubag Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi, mempunyai tugas antara lain :

- a. Pengelolaan data pendukung perencanaan yang dikelola sesuai aturan
- b. Pengelolaan data kinerja kecamatan secara periodik
- c. Penyusunan daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi secara periodic
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

2.1 Rencana Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan dalam rangka mendukung mencapai Rencana Kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan Perak dengan indikator Rencana Kinerja:

1. Terlaksananya pengelolaan data pendukung perencanaan sesuai aturan
2. Terlaksananya Pengelolaan data kinerja kecamatan secara periodik.

maka Pengelola Program dan Laporan Kecamatan Perak berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No	Kinerja Atasan yang diintervensi	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sesuai aturan	Pengelolaan data pendukung perencanaan yang dikelola sesuai aturan	Jumlah data pendukung perencanaan yang dikelola	19 dokumen
2	Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD secara periodik dan sesuai aturan	Pengelolaan data kinerja kecamatan secara periodik	Jumlah data kinerja kecamatan yang dikelola	1 Dokumen
3	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu	Penyusunan daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi secara periodik	Jumlah daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi	14 Dokumen

2.2 Capaian Kinerja

Pencapaian Rencana Kinerja kinerja yang telah diperjanjikan selama tahun 2023 dengan hasil pengukuran sebagai berikut:

NO	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengelolaan data pendukung perencanaan yang dikelola sesuai aturan	Jumlah data pendukung perencanaan yang dikelola	19 dokumen	19 dokumen	100%
2.	Pengelolaan data kinerja kecamatan secara periodik	Jumlah data kinerja kecamatan yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
3.	Penyusunan daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi secara periodik	Jumlah daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi	14 Dokumen	14 Dokumen	100%

2.3 Keterkaitan dengan Komponen Perencanaan

Keterkaitan antara indikator kinerja individu dengan komponen perencanaan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterkaitan dengan komponen perencanaan			
						Nomenklatur	Anggaran	Realisasi	%
1	Pengelolaan data pendukung perencanaan yang dikelola sesuai aturan	Jumlah data pendukung perencanaan yang dikelola	19 dokumen	19 dokumen	100%	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,451,500	4,451,500	100
2	Pengelolaan data kinerja kecamatan secara periodik	Jumlah data kinerja kecamatan yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,550,000	1,550,000	100
3	Penyusunan daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi secara periodik	Jumlah daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi	14 Dokumen	14 Dokumen	100%	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,454,556,932	2,309,846,114	94,10

2.4 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Hasil pencapaian kinerja Rencana Kinerja sebagaimana tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah data pendukung perencanaan yang dikelola sejumlah 19 dokumen.
2. Jumlah data kinerja kecamatan yang dikelola sebanyak 1 dokumen.
3. Jumlah daftar gaji dan tunjangan ASN dan dokumen pendukung SPJ Keuangan yang diadministrasi sebanyak 14 Dokumen.

Beberapa faktor pendorong pencapaian kinerja tersebut, adalah:

- a. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 8/A);
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023
- c. Adanya SOP pada masing-masing seksi sebagai dasar dan tolak ukur pelaksanaan kerja serta pedoman sesuai standar pelayanan
- d. Dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada seluruh kegiatan secara rutin dan berkelanjutan

- e. Adanya dukungan dan komitmen dari atasan langsung serta seluruh aparaturnya untuk selalu berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

2.5 Upaya Perbaikan Kinerja

Guna optimalisasi pencapaian kinerja Rencana Kinerja maka beberapa faktor penghambat yang muncul perlu segera ditangani antara lain melalui:

1. Meningkatkan kualitas pada proses perencanaan kegiatan dan anggaran agar tepat Rencana Kinerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Membangun komitmen bersama untuk selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Meningkatkan pembinaan kepada aparaturnya untuk meningkatkan kompetensi serta mengirim pada berbagai diklat.

BAB III PENUTUP

Pencapaian kinerja sasaran Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah , Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu , Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang akurat dan akuntabel, Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu dan Sesuai Aturan Kecamatan Perak, secara umum telah tercapai sesuai dengan target.

Beberapa faktor pendukung tercapainya indikator kinerja individu tersebut tidak terlepas dari adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu mengedepankan penyelesaian seluruh program kegiatan demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi mencapai Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing.

Jombang, Januari 2024
PENGELOLA PROGRAM DAN
LAPORAN

DANY EKA NOVITASARI, A.Md.Keb
Pengatur Tingkat I
NIP. 198401032017042003

3 Tanggapan Atasan Langsung

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki / revisi |

Catatan :

Kerja yang baik agar dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk tahun kedepannya agar tercapai seluruh target kinerja.

Jombang, Januari 2024
KASUBAG KEUANGAN,
PENYUSUNAN PROGRAM
DAN EVALUASI

BAGUS RACHMAT, S.IP
Penata Muda Tk. I
NIP. 198509282005011001